

**PERANAN MAHASISWA YOGYAKARTA
DALAM PERJUANGAN REFORMASI
DI INDONESIA (1998)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan**



**Oleh
Angga Apip Wahyu Saputra
07406244009**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia (1998)” ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Pembimbing



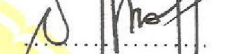
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aman M.Pd.', written in a cursive style.

Dr. Aman M.Pd.
NIP. 19741015 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia (1998)" ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Zulkarnaen, M. Pd	Ketua Penguji	
Dr. Aman, M. Pd	Sekretaris Penguji	
Terry Irenewaty, M. Hum	Penguji Utama	

Yogyakarta, September 2012

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag

NIP. 19620321 1989 03 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Angga Apip Wahyu Saputra

NIM : 07406244009

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Judul : Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi Di
Indonesia (1998).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis, dan diterbitkan orang lain atau pernah dipergunakan untuk syarat penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai sumber atau acuan dengan tata tulis ilmiah yang lazim. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 31 Juli 2012
Yang menyatakan

Angga Apip Wahyu Saputra
NIM. 07406244009

MOTTO

- ❖ Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri.
- ❖ Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan dan istiqomah dalam menghadapi cobaan.
- ❖ Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar.
- ❖ Sesekali lihatlah ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

- Ayah bunda tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta ayah bunda padaku.

Serta tidak lupa kubingkiskan kepada:

- Saudaraku Anggita Oktaviana Apip Setiarini.
- Anita Sari Mahasiswa Pendidikan Seni Tari Angkatan Tahun 2008
- Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- Keluarga besar Universitas negeri Yogyakarta, yang telah memberiku kelonggaran waktu sehingga aku dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di program studi Pendidikan Sejarah Non Reguler tahun angkatan 2007 dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

PERANAN MAHASISWA YOGYAKARTA DALAM PERJUANGAN REFORMASI DI INDONESIA (1998)

Oleh
Angga Apip Wahyu Saputra

ABSTRAK

Latar belakang penelitian berupa skripsi ini adalah peranan mahasiswa Yogyakarta dalam perjuangan reformasi di Indonesia. Dari hasil skripsi ini bertujuan untuk; (1) menggambarkan Mengetahui keadaan politik, ekonomi dan pemerintahan Indonesia sebelum reformasi tahun 1998, (2) mengetahui berbagai peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia, (3) mengetahui dampak dari perjuangan mahasiswa dalam reformasi pada tahun 1998 baik di Indonesia maupun di Yogyakarta pada khususnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis kritis dengan cara memperoleh data dan informasi, baik dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen, internet, wawancara dari para pelaku serta responden yang berkaitan tentang masalah yang dibahas oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data terhadap beberapa responden yang mengetahui pokok bahasan yang ditulis oleh penulis.

Hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan responden dan para pelaku sejarah adalah; (1) mengetahui keadaan politik, ekonomi dan pemerintahan Indonesia sebelum reformasi tahun 1998. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa keadaan politik, ekonomi dan pemerintahan sebelum reformasi pada tahun 1998 di Indonesia mengalami kekacauan. Di semua bidang kehidupan terkena dampak yang signifikan akibat krisis moneter, (2) mengetahui berbagai peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran aktif dalam menggerakkan roda laju reformasi. Berbagai tuntutan para mahasiswa dijalankan dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi dan lain sebagainya sebagai sarana perjuangan menuju perubahan, (3) mengetahui dampak dari perjuangan mahasiswa dalam reformasi pada tahun 1998 di Indonesia. Dampak yang sangat jelas terlihat pada kala itu ialah mundurnya Presiden Soeharto sebagai kepala Negara dan berbagai dampak lainnya yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pendidikan.

Kata kunci: Mahasiswa, Yogyakarta, Perjuangan, Reformasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Pembuatan skripsi ini adalah suatu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd MA selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta, segenap para dosen dan seluruh staf yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat M. Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Drs. M Nur Rokhman M. Pd, selaku kepala jurusan Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Aman M. Pd. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan bantuan, arahan dan nasehatnya penulis menjadi lebih mengerti.
5. Responden dan nara sumber yang telah membantu memberi informasi sebagai data pembuatan skripsi ini.
6. Ayahanda dan ibunda yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun material.

7. Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang juga telah turut membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya semua penulis kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya penulis dapat membuat skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sesuatu karya yang memberi dampak positif.

Yogyakarta, 2 Agustus 2012

Penulis

Angga Apip Wahyu Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Historiografi yang Relevan	13
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	15

a. Metode Penelitian.....	15
b. Pendekatan Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA PADA TAHUN 1998

A. Krisis Ekonomi.....	23
B. Krisis Institusi.....	30
C. Krisis Kepercayaan.....	32
D. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).....	34

BAB III AKSI MAHASISWA YOGYAKARTA MENUNTUT REFORMASI TAHUN 1998 DI INDONESIA

A. Aksi Mahasiswa Yogyakarta.....	40
B. Insiden 2-3 April 1998.....	48
C. Larangan Politik Praktis.....	52
D. Rapat Akbar Masyarakat Yogyakarta.....	55
E. Aksi Massa NonKampus.....	57
F. Bentrokan Di Gejayan.....	59
G. Mahasiswa Berkabung.....	63
H. Aksi Damai Rakyat Yogyakarta.....	67
I. Maklumat Sri Sultan dan Paku Alam.....	70
J. Prof. Dr Ichlasul Amal Tokoh Reformasi Damai 1998.....	72
K. Titik Demonstrasi Mahasiswa Yogyakarta 1998.....	74
L. Presiden Soeharto Mengundurkan Diri.....	75

BAB IV DAMPAK DARI PERJUANGAN MAHASISWA DALAM REFORMASI PADA TAHUN 1998 DI INDONESIA	
A. Dampak di Bidang Ekonomi.....	78
B. Dampak di Bidang Politik.....	84
C. Dampak di Bidang Sosial dan Budaya	99
D. Dampak di Bidang Pendidikan.....	108
BAB V KESIMPULAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Akprind	: Akademi Perindustrian Menjadi Amanat Keluarga Pejuang Republik Indonesia.
AMM	: Angkatan Muda Muhammadiyah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of South East Asia Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
Bahari	: Barisan Mahasiswa untuk Reformasi
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak.
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa.
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Bopkri	: Badan Oesaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Dalmas	: Pengendalian Massa
Dandim	: Komandan Kodim.
DDII	: Dewan Dakwah Islam Indonesia.
DI	: Daerah Istimewa
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta.

DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dr	: Doktor
Drs	: Doktorandus
FABRI	: Fraksi ABRI
Fampera	: Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat
FE	: Fakultas Ekonomi
Fisipol	: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
FKSMY	: Tim Advokasi Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta
FPDI	: Fraksi Demokrasi Indonesia
FPP	: Fraksi Persatuan Pembangunan
FPUB	: Forum Persaudaraan Umat Beriman
GAPCI	: Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia
GKJ	: Gereja Kristen Jawa
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
H	: Haji
HAM	: Hak Asasi Manusia
HB	: Hamengku Buwono
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam

IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IISP	: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IMF	: International Monetary Fund
Inf	: Infantri
Intel	: Intelejen
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ITB	: Institut Teknologi Bandung
Ir	: Insinyur
ISI	: Institut Seni Indonesia
IST	: Institut Sains dan Teknologi
Jakbar	: Jakarta Barat
Kadit	: Kepala Direktorat
Kagama	: Keluarga Alumni UGM
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Kamtibpus	: Keamanan dan Ketertiban Kampus
Kapolres	: Kepala Polisi Resort
KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KBMIY	: Keluarga Besar Mahasiswa IKIP Yogyakarta
KGPAA	: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya
KGPH	: Kanjeng Gusti Pangeran Haryo
KH	: Kyai Haji
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KKY	: Komite Kemanusiaan Yogyakarta
KM UGM	: Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Komnas	: Komisi Nasional
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kol	: Kolonel
Kopma	: Koperasi Mahasiswa
KRPI	: Kesatuan Rakyat Peduli Indonesia
KPRP	: Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Laksda	: Laksamana Muda
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
Letkol	: Letnan Kolonel
LMMY	: Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
Mayjen	: Mayor Jendral
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menhankam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
Menkeh	: Menteri Kehakiman
Menko Ekuin	: Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan

Menko Kesra	: Menteri coordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Migas	: Minyak dan Gas
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Mahasiswa Pecinta Rakyat dan Seni
M. Hum	: Magister Hukum
No	: Nomor
Pangab	: Panglima ABRI
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permen	: Peraturan Menteri
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMKRI	: Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
Pol	: Polisi
Polda	: Polisi Daerah
Polres	: Polisi Resort
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRJ	: Pekan Raya Jakarta
Prof	: Profesor
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara

PUDI	: Partai Uni Demokrasi Indonesia
Purn	: Purnawirawan
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
RI	: Republik Indonesia
Rp	: Rupiah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RS	: Rumah Sakit
RSUP	: Rumah Sakit Umum Pusat
SARA	: Suku, Agama, Ras, Anatomi
SBSI	: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
SBY-JK	: Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
SD	: Sekolah Dasar
Serma	: Sersan Mayor
SH	: Sarjana Hukum
SIUPP	: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMTA	: Sekolah Menengah Tahap Akhir
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SMUR	: Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi
SpB	: Spesialis Bedah

STIE	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Stikers	: STIE Kerja Sama
STPMD	: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
SU MPR	: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tap	: Ketetapan
TK	: Taman Kanak-kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UAJY	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
UCY	: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
UGM	: Universitas Gajah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UII	: Universitas Islam Indonesia
UJB	: Universitas Jana Badra
UKDW	: Universitas Kristen Duta Wacana
UMY	: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
Unila	: Universitas Negeri Lampung
UNS	: Universitas Negeri Solo
URC	: Unit Reaksi Cepat
US	: United State
USD	: Universitas Sanata Dharma
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar

WIB : Waktu Indonesia Barat

YKPN : Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

DAFTAR ISTILAH

- Agresif : Digunakan untuk menunjukkan perilaku sebagai mempertahankan hak sendiri dengan cara yang dapat mengorbankan hak orang lain; mengabaikan kebutuhan, keinginan, pendapat, perasaan atau keyakinan orang lain; mengekspresikan kebutuhan, keinginan dan pendapat sendiri dengan cara yang kurang pantas.
- Air bah : Air yang meluap, mengalir deras, dan menggenangi sawah (perkampungan, kota, dan sebagainya)
- Akbar : besar
- Aktivis : Orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, pemuda, wanita, dsb) yang bekerja aktif dalam organisasinya.
- Alumnus : Orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah.
- Aset : Milik dari suatu instansi, Negara atau perorangan
- Aspirasi : Harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
- Barier : Penahan air laut.
- Beasiswa : Tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar
- Birokrasi : Suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan

aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar.

- Bos : Pimpinan.
- Dakwah : Penyiaran, propaganda, penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama
- Deklarasi : Pernyataan ringkas dan jelas.
- Demonstrasi : Sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
- Devaluasi : Penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas (misal untuk memperbaiki perekonomian).
- Devisa : Semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
- Dialog : Pembicaraan atau perbincangan untuk mengatasi permasalahan.
- Domestik : Berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri.
- Dosen : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- Ekspor : Kegiatan mengirim barang ke luar negeri.
- Episode : Babak
- Fraksi : Suatu partai yang menduduki kursi di parlemen.
- Gerakan tarbiyah : Pendidikan, pengajaran, dan pembinaan. Gerakan ini disebut sebagai Tarbiyah karena menekankan pembinaan anggotanya melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai media pertemuan.
- Hortikultura : Seluk-beluk kegiatan atau seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias
- Ikrar : sumpah.
- Imam : Orang yang diikuti, baik sebagai kepala, jalan, atau sesuatu yang membuat lurus dan memperbaiki perkara.
- Impor : Memasukkan barang dagangan dsb dr luar negeri ke dalam negeri.
- Inflasi : Suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus menerus.
- Insiden : Kejadian
- Intelektual : kaum yang berilmu pengetahuan.
- Interpretasi : Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis thd sesuatu, tafsiran.

- Instruksi : Perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas)
- Internasional : Menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau antarbangsa.
- Investasi : Mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial.
- Kabinet : Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet.
- Kolusi : Pemufakatan atau kerja sama secara rahasia untuk maksud tidak terpuji dan atau persekongkolan.
- Komunis : Paham yang merupakan sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan produk masyarakat liberal.
- Konstitusi : Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan

hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

- Koperasi : Organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
- Korporasi : Figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata
- Korupsi : penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.
- Krisis ekonomi : Istilah lama dalam teori siklus bisnis, merujuk pada perubahan tajam menuju resesi.
- Krisis moneter : Krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur.
- Kronologi : Urutan suatu peristiwa atau kejadian
- Kurikulum : Perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Legislasi	: Pembuatan undang-undang
liberal	: Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Likuidasi	: Pencabutan izin operasi.
Long march	: Perjalanan panjang bersama-sama
Mafia hukum	: Semua tindakan oleh prorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.
Mahasiswa	: Panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.
Maklumat	: Pemberitahuan; pengumuman
Massa	: Suatu bentuk kumpulan individu-individu, dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama.
Mereduksi	: Harfiahnya merupakan pengurangan, penyempitan, sebuah proses mengambil kembali.
Monarki	: Sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa atau pemerintah kerajaan.
Monitoring	: Pengawasan.

Monopoli	: Suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.
Multi	: Banyak.
Nepotisme	: Lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya.
Nonblok	: Suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun.
Oknum	: Anggota
Oligopoli	: Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan.
Orasi	: Pidato pengukuhan
Orde Baru	: Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.
Padatkarya	: Pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah yang besar)
Pailit	: Keadaan debitor dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya karena hal-hal yang tidak dapat dipastikan.
Perbankan	: Segala sesuatu mengenai bank.
Pemilu	: Ajang politik untuk memilih partai politik, pimpinan, anggota DPR atau MPR dan lain sebagainya.
Pers	: Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio

PHK	: Pemberhentian pekerjaan seseorang
Pisowanan Ageng	: Pertemuan besar di Alun-alun Utara antara rakyat Yogyakarta dengan Raja, guna menyampaikan keluhan kesah dan masalah yang dihadapi rakyat.
Politik praktis	: Kepentingan yang tujuannya adalah kekuasaan (apapun motivasinya). Kekuasaan sering membuat orang lupa.
Politeknik	: Hal-hal yang bersangkutan dng pengajaran keterampilan dan ilmu-ilmu terapan
Privasisasi	: Tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu
Prodemokrasi	: Mendukung pemerintahan rakyat.
Prosedur	: Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah
Reformasi	: Berasal dari kata Inggris yaitu reform (Latin: reformare) yang berarti: perbaikan, pembaruan, pemulihan kembali.
Rekapitulasi	: Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan.
Rektor	: Pimpinan dari suatu perguruan tinggi.
Renovasi	: Perbaikan
Represif	: Menekan, mengekang, menahan, atau menindas.

- Restribusi : Pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa: akan ditarik -- dr setiap kendaraan yg lewat jalan itu
- Rezim : Serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dan lain-lain) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.
- Rohaniawan : Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan kepemimpinan resmi dalam suatu agama tertentu.
- Salafi : Pengikut orang-orang terdahulu. Di Indonesia, Salafi mengandung dua makna, pertama merujuk pada sekolah atau pesantren tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama.
- Seniman : Istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni.
- Separatisme : Paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).
- Sesepuh : Yang dituakan.
- Shalat hajat : Cara yang lebih spesifik untuk memohon kepada Allah agar dikabulkan segala hajat.

- Shalat Taubat : Shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat.
- Sidang paripurna : Forum tertinggi di DPR. Hakekatnya adalah musyawarah-mufakat.
- Sporadis : Penyakit atau kejadian yang jarang timbul dan munculnya tidak teratur.
- Studi : Kegiatan pembelajaran
- Subsidi : Sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen , distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu.
- Tahanan politik : Orang yang ditahan krn dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan politik.
- Tionghoa : Orang-orang keturunan etnis Cina
- Transformasi politik : Perubahan pandangan menjurus kearah politik
- Unjuk rasa : Adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
- Wartawan : Orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X	126
2. Lampiran 2 Foto responden Wulan Agus Dharmadji	127
3. Lampiran 3 Hasil Wawancara Wulan Agus Dharmadji.....	128
4. Lampiran 4 Foto Responden Arini Susanti.....	130
5. Lampiran 5 Hasil Wawancara Arini Susanti.....	131
6. Lampiran 6 Foto Prof. Dr. H Amin Rais.....	133
7. Lampiran 7 Foto Aksi Mahasiswa di Jalan Gejayan.....	134
8. Lampiran 8 Foto Aksi Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR RI...	135
9. Lampiran 9 Foto Almarhum Mozez Gatotkaca.....	136
10. Lampiran 10 Foto Sri Sultan HB X	137

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi dalam sejarah pemerintahan Orde Baru pada tahun 1997, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia dan lain sebagainya tampaknya telah menjadi semacam keadaan sulit terutama dalam bidang perekonomian yang terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang melanda negara-negara yang mengalami berbagai kekacauan politik. Ada yang menyebutkan, krisis ini bukan lagi merupakan penurunan nilai rupiah melainkan sudah menuju pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru.

Hampir seluruh bidang kehidupan telah terkena krisis kepercayaan yang luar biasa. Di bidang hukum misalnya, hukum telah menjadi politik kekuasaan, sehingga jaminan keadilan dan kebenaran seolah-olah hanya merupakan sebuah mimpi. Aturan hukum disalah gunakan seenaknya sendiri demi menjaga stabilitas kekuasaan. Ajaran mengenai kepercayaan tampaknya bertolak dari suatu pemahaman kehidupan masyarakat yang sangat nyata dan beberapa orang beranggapan bahwa manusia selain sebagai makhluk relasional juga individu yang merasa harus memaksimalkan keinginannya akan pemenuhan materi demi kepentingan pribadinya entah itu dengan jalan kebenaran atau jalan kesalahan.

Dibidang ekonomi, kesempatan berusaha bagi setiap pelaku ekonomi

merupakan sesuatu yang mustahil, karena kegiatan ekonomi dalam skala dan volume yang besar telah dikuasai oleh elit-elit ekonomi yang memiliki akses dan kedekatan dengan pemegang kekuasaan politik. *Monopoli*¹ dan *oligopoli*² menjadi kosakata yang terasa tidak baik dan membunuh perlahan-lahan. Dengan adanya monopoli pasar, maka harga yang dipasang oleh kalangan elit ekonomi menjadi melambung dan masyarakatpun tidak bisa menjangkau harga yang semakin melonjak tinggi tersebut.

Dikala pemerintah sibuk mencari solusi masalah ekonomi, masyarakat sibuk mencari jalan keluar untuk bertahan dari kelaparan. Rakyat dan pasar internasional semakin sulit mempercayai solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator yang paling jelas adalah terus terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Lebih buruk lagi, setiap kali solusi baru yang diambil oleh pemerintah membuat nilai rupiah justru semakin terperosok.

Indonesia pada tahun 1997 dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Hal tersebut terlihat jelas dengan banyak ditayangkan di beberapa stasiun televisi mengenai krisis keadilan, serta bencana alam yang sempat terjadi hampir bersamaan. Selain menyebabkan sebagian sektor

¹ Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: *monos*, satu + *polein*, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis". Tersedia pada id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli. Diakses pada tanggal, 8 Juni 2011.

² Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Tersedia pada id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli. Diakses pada tanggal, 8 Juni 2011.

perekonomian lumpuh, hal itu juga membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terganggu. Dari berbagai macam persoalan yang ada, terdapat beberapa orang yang menyindir tentang lambannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para korban bencana alam. Masyarakat kecil terus merasakan derita dan sementara mereka yang berpendidikan tinggi serta memiliki jabatan semakin hidup dengan begitu nyaman tanpa sepengetahuan masyarakat mereka mengambil jalan yang tidak halal untuk mendapatkan kekuasaan itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini telah dalam batas kondisi yang memprihatinkan. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah begitu banyak menguras kekayaan negara.³

Salah satu fenomena signifikan dan relevan untuk melihat krisis pada tahun 1997 adalah fenomena gerakan massa, yang didalamnya melibatkan mahasiswa. Cara pandang terhadap dinamika gerakan mahasiswa sendiri relatif beragam. Mereka yang menganggap gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral berpandangan bahwa mahasiswa hanyalah sebagai perubah dalam menggugat setiap bentuk ketidakadilan sosial dalam masyarakat, dan sebagai gerakan moral, tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap kekuasaan.⁴

³ Farhan Effendy, *Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme*, Jakarta: Inside, 2000. hlm. 45.

⁴ Sonny keraf, *Reformasi Politik dan Moral*, Pena Mahasiswa Maret-April. hlm. 29.

*Reformasi*⁵ tiba-tiba menjadi populer di negeri kita. Banyak orang di mana-mana meneriakkan perlunya segera reformasi itu dilaksanakan. Padahal, tentu tidak semua orang tahu persis makna kata yang mereka teriakkan dan mereka tuntutan. Gerakan reformasi pada hakikatnya menuntut perubahan total Rezim Orde Baru. Baik sistem politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Reformasi yang membuat segalanya lebih baik dibanding sebelumnya.⁶

Berbicara tentang reformasi tidak terlepas dari pembicaraan mengenai peranan mahasiswa. Setiap orang di negeri ini yang peduli akan nasib bangsanya pasti mengetahui bahwa para mahasiswa adalah pelopor dan pejuang reformasi. Para mahasiswalah yang pertama mencetuskan dan mengobarkan semangat pembaharuan. Perjuangan ini berdasarkan pada keterpurukan nasib bangsa sebagai akibat dari krisis yang menderanya. Di dalam diri para mahasiswa ada keyakinan bahwa krisis multidimensional ini hanya akan terselesaikan jika dilakukan reformasi total. Krisis multidimensional yang dialami oleh negara Indonesia terdapat dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial. Terdorong oleh kesadaran ini, para

⁵ Istilah reformasi berasal dari kata Inggris yaitu *reform* (Latin: *reformare*) yang berarti: perbaikan, pembaruan, pemulihan kembali. Nusantara, A. Ariobimo dkk, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, Jakarta: Grasindo, 1998. hlm. 23.

⁶ *Ibid.*

mahasiswa tampil ke pentas politik nasional menyuarakan kepentingan atau suara rakyat.⁷

Perjuangan para mahasiswa bagi pembaharuan total bukan tanpa pengorbanan. Berhadapan dengan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa, pihak mahasiswa harus mengorbankan segala sesuatu yang ada pada mereka, termasuk hidup mereka sendiri. Masih segar dalam ingatan rakyat Indonesia berbagai peristiwa kekerasan yang merenggut nyawa sejumlah mahasiswa. Peristiwa itu terjadi ketika mereka sedang memperjuangkan atau menyuarakan aspirasi rakyat. Sebut saja penembakan di Universitas Trisakti, tragedi Semanggi I dan II. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

⁷ Atapunang, AI, *KKN dan perjuangan Mahasiswa*, Maumere, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2000. hlm. 89.

Sekali pun ada banyak tantangan dan halangan, kaum intelektual muda ini tidak patah semangat. Malahan pengorbanan dari mahasiswa yang gugur sebagai pejuang keadilan dan kebenaran memberikan semangat tersendiri bagi mereka yang lain untuk meneruskan perjuangan yang suci.⁸ Perjuangan-perjuangan mereka terpusat di Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan kota-kota lainnya. Para mahasiswa menuntut suatu perubahan total diberbagai bidang dan lembaga. Mereka menganggap reformasi total merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis nasional. Hasil dari perjuangan para mahasiswa itu pun tidak sia-sia. Mereka berhasil membuat mundurnya Presiden Soeharto dan diadakannya pemilihan umum pada tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah keadaan politik, ekonomi dan pemerintahan Indonesia sebelum reformasi tahun 1998?
2. Bagaimanakah peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998?
3. Bagaimanakah dampak dari perjuangan mahasiswa dalam reformasi pada tahun 1998 di Indonesia?

⁸ *Ibid*, hlm. 89.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Meningkatkan dan melatih daya pikir yang kritis, analitis, sistematis, dan objektif serta peka terhadap fenomena dan peristiwa di masa lampau.
- b. Melatih penulis untuk menyusun sebuah karya sejarah dalam rangka mempraktikkan metodologi sejarah yang kritis.
- c. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sejarah Indonesia modern, khususnya pada peristiwa reformasi 1998 di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui keadaan politik, ekonomi dan pemerintahan Indonesia sebelum reformasi tahun 1998
- b. Untuk mengetahui peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998.
- c. Mengetahui dampak dari perjuangan mahasiswa dalam reformasi pada tahun 1998 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998.

- b. Tulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai proses terjadinya perjuangan reformasi oleh para mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 1998.
- c. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para pembaca khususnya para sejarawan untuk merefleksikan jiwa pahlawan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi penulisan karya tulis sejarah selanjutnya.

2. Bagi Penulis

- a. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis didalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkaya pengetahuan sejarah di Indonesia, terutama Yogyakarta pada masa reformasi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian bisa yang menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-

duanya.⁹ Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan dalam kajian pustaka.

Istilah reformasi berasal dari kata Inggris yaitu *reform* (Latin: *reformare*) yang berarti: perbaikan, pembaruan, pemulihan kembali. Dalam konteks reformasi yang dituntut dan dilakukan mahasiswa akhir-akhir ini, dan sebagian besar masyarakat Indonesia, maka reformasi adalah gerakan pembaruan.¹⁰ Gerakan reformasi pada hakikatnya menuntut perubahan total rezim Orde Baru. Baik sistem politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Pendeknya reformasi yang membuat segalanya lebih baik dibanding sebelumnya.

Dalam buku yang berjudul “Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi”, yang ditulis oleh Nusantara, A. Ariobimo dkk, diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta pada tahun 1998, dapat dijadikan salah satu literatur yang cukup komprehensif dan dalam buku ini juga menjelaskan mengenai latar belakang munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa embrio dari gerakan reformasi oleh para mahasiswa berasal dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada Juli 1997. Krisis itu dipicu oleh jatuhnya bath Thailand terhadap AS\$, sehingga pada 21 Juli 1997 nilai tukar rupiah yang semula Rp2500 per AS\$ merosot menjadi Rp 2.650, untuk seterusnya semakin melemah hingga mencapai Rp15.000 per AS\$. Kehabisan akal dalam mengatasi krisis tersebut, akhirnya

⁹ Daliman, *Pedoman Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006. hlm. 3.

¹⁰ Nusantara, A. Ariobimo dkk, *op. cit.*, hlm. 23.

Pemerintah secara berani meminta bantuan IMF pada tanggal 8 Oktober 1997. Namun bantuan IMF tersebut malah menuntut korban. Yaitu dengan adanya likuidasi (pencabutan izin usaha operasi) 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Inilah titik awal lahirnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan nasional.¹¹

Terdapatnya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) juga membuat gerakan reformasi di Indonesia semakin menampakan diri. Rakyat dan mahasiswa menuntut KKN tersebut dihapuskan. Bersamaan dengan itu, pemerintah dianjurkan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik yang akan naik per 1 April 1998 yang juga mendapat reaksi keras dari masyarakat. Dari hal-hal tersebut, maka muncullah gerakan moral yang dipelopori oleh mahasiswa yang melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Soeharto dan rezimnya. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali Presiden Soeharto harus mundur. Perlu reformasi total terhadap *rezim*¹² Orde Baru.¹³

Dalam buku yang berjudul “Lengser Keprabon”, karangan Lampito, Octo dkk yang diterbitkan oleh Grafika Wangsa Bakti pada tahun 1998 ini pun dapat dijadikan salah satu literature dalam penulisan sejarah ini. Dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Rezim>. Diakses pada tanggal, 5 Maret 2012.

¹³ Nusantara, A. Ariobimo, *op. cit.*, hlm. 31.

buku tersebut banyak dijelaskan dan digambarkan proses terjadinya unjuk rasa dan perjuangan reformasi 1998 di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Peranan mahasiswa Yogyakarta dari berbagai perguruan tinggi ini sangatlah banyak dalam aksi ini. Tiada hari tanpa demo, termasuk hari libur. Minggu 8 Maret, sekitar 50 mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok Cipayung Yogyakarta menggelar aksi “Diam Menuntut Perubahan” di Jalan Malioboro, namun ketika hendak bergerak ke Alun-alun Utara dihadang oleh aparat. Peserta aksi itu dinaikan ke truk dan diangkut ke markas Polresta Yogyakarta.¹⁴

Para mahasiswa marah ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Wiranto Arismunandar menuding mahasiswa amatiran dalam soal politik. Pada saat Mendikbud melantik rektor UGM, para mahasiswa menggelar mimbar bebas dan menuntut Mendikbud untuk menarik kembali ucapannya. Upaya tersebut gagal karena yang bersangkutan meninggalkan tempat tersebut lebih awal dari jadwal. Dari demonstrasi haingga mogok makan dilakukan oleh mahasiswa serta insiden 2-3 April yang terjadi di Bundaran Universitas Gadjah Mada semakin menguatkan hati mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia tahun 1998.

Bertepatan dengan hari Kartini 21 April 1998, Yogyakarta kembali disemarakan dengan demonstrasi. Segenap elemen masyarakat seperti dosen, rohaniawan-rohaniawati, pemuda, pelajar, seniman dan lain sebagainya menyatu dengan mahasiswa di depan gedung Sabha Pramana Universitas

¹⁴ Octo Lampito dkk, *Lengser Keprabon: Dokumen Reformasi*, Yogyakarta: Grafika Wangsa Bakti, 1998. hlm. 2.

Gajah Mada, para peserta aksi yang mencapai 15.000 orang lebih bergabung dalam rapat akbar masyarakat Yogyakarta. Banyak juga tergabung kesatuan aksi mahasiswa lain di dalamnya.¹⁵

Pada tanggal 5 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta berkumpul menjadi satu untuk menduduki Jalan Gejayan setelah menggelar aksi di kampus Universitas Sanata Dharma. Bentrokan itu bermula ketika aparat membubarkan secara paksa dengan menyemprotkan gas air mata dan air kepada mahasiswa. Peserta aksi yang kebingungan dan takut segera berlarian sambil membalas dengan lemparan batu ke arah petugas. Petugas yang terpojok segera mengejar mereka hingga ke perkampungan penduduk disekitar Jalan Gejayan. Keadaan di Gejayan begitu mencekam karena aparat terus mencari para mahasiswa. Begitu bertemu dengan mahasiswa, langsung dipukul dan diseret. Akibat dari kejadian itu, banyak motor yang diparkir di sekitar IKIP Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma menjadi rusak. Menjelang malam para penduduk di sekitar Gejayan dan Samirono keluar rumah. Mereka membakar ban dan meletakkan berbagai benda di tengah jalan.

Aksi demonstrasi di Jalan Gejayan tersebut massa sempat menyandera ketua DPRD DIY Subagyo Waryadi dan Anggota Fraksi ABRI Kolonel Sriyono karena tidak bersedia mengantarkan peserta aksi untuk bergerak menuju DPRD. Tiga hari kemudian bentrokan kembali terjadi di Gejayan. Akibat kejadian itu, Mozes Gatotkaca alumnus Amanat Keluarga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Pejuang Republik Indonesia (Akprind) Yogyakarta yang terjebak dikerumunan unjuk rasa itu pun menjadi korban tewas di sebelah Utara Hotel Radisson. Menurut pengakuan rekan-rekannya, Mozes tidak ikut unjuk rasa, melainkan ingin membeli nasi di warung sekitar Mrican.¹⁶

Tidak hanya mahasiswa yang melakukan aksi di Yogyakarta. Dalam maklumat Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang digelar dalam *Pisowanan Ageng*¹⁷, mendukung gerakan reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memikat rakyat. Dalam Pisowanan Ageng tersebut dihadiri oleh 1 juta orang lebih, baik mahasiswa maupun warga DIY, termasuk warga kota lain yang ditutup dengan sambutan massa yang mengelu-elukan Sri Sultan.¹⁸

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi dari adanya historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁷ Dalam sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat, Pisowanan Ageng merupakan sarana bagi rakyat Yogyakarta untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dahulu Pisowanan Ageng merupakan wujud "hak" pepe, di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke Alun-alun Utara Yogyakarta dan berjemur diri di panas terik matahari. Tindakan pepe dilakukan hingga Sultan datang menemui mereka dan menanyakan apa dan mengapa mereka melakukan laku pepe. B Hestu Cipto Handoyo, 2008. Dilema pisowanan Ageng. Tersedia pada vgsiahaya.wordpress.com/2008/.../dilema-pisowanan-ageng. *Diakses pada tanggal, 8 juni 2011*.

¹⁸ Octo Lampito, *op. cit.*, hlm. 24.

keaslian (orisinalitas) sebuah karya ilmiah. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan orisinalitas karya ilmiah.¹⁹

Sejarah yang ada pada masa kini merupakan suatu gambaran dari peristiwa masa lampau yang ditulis oleh manusia. Berawal dari penjelasan historiografi tersebut, penulis menemukan beberapa historiografi yang relevan dengan penulisan yang akan diajukan sebagai berikut.

Pertama adalah buku karangan Octo Lampito yang berjudul *Lengser Keprabon: Dokumen Reformasi* yang diterbitkan oleh Grafika Wangsa Bakti pada tahun 1998 ini oleh penulis dijadikan sebagai sumber acuan dalam penulisan skripsi ini. Dalam buku tersebut banyak hal menjelaskan dan menggambarkan mengenai peristiwa dan kronologi secara detail mengenai aksi mahasiswa dan warga Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia serta berbagai peristiwa terkait yang terdapat di Yogyakarta.

Kedua adalah buku karangan Nusantara, A. Ariobimo dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Grasindo dengan judul *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*. Buku ini memaparkan mengenai latar belakang munculnya gerakan reformasi dan proses terjadinya reformasi di Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga memaparkan berbagai dampak dari peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

¹⁹ Daliman,. *op. cit.* hlm. 3.

Ketiga yaitu tulisan dari James Luhulima yang berjudul *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa Peristiwa Terkait* yang diterbitkan oleh Kompas merupakan literatur yang menjadi pelengkap dalam penulisan skripsi ini. Karya ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi sumber-sumber dan data-data yang berkaitan dengan peristiwa reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Selain hal tersebut, penulis juga menggunakan buku-buku lain serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan empat tahap untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah).

Metode sejarah menurut M. Natsir adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan serta pengalaman masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah

adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁰

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode historis kritis yang meliputi empat tahap. Adapun Keempat tahap yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “heuriskein” yang berarti mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah. Heuristik diperoleh dari dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Sumber sekunder yaitu kesaksian dari saksi orang lain.²¹ Arti lain sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata.²² Dalam tahap ini, penulis menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. Pada tahap ini penulis perlu menentukan tema dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul ataupun tema yang diambil oleh penulis. Skripsi mengenai ”peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam perjuangan reformasi di Indonesia

²⁰ Louis Gottschalk, “ Understanding History “a. b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 34.

²¹ IG Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1989, hlm. 18.

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm. 96.

pada tahun 1998” ini merupakan penelitian pustaka. Oleh karena itu, penulis melakukan kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah dari literatur-literatur yang tentu saja berkaitan dengan topik permasalahan.

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga kesaksian menggunakan panca indera lain atau juga saksi dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata.²³ Sedangkan sumber sekunder menurut Louis Gottschalk yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

b) Kritik Sumber

Apabila semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul, maka dilakukan kritik sumber terhadap sumber yang diambil. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan. Kritik sumber sendiri berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi

²³ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 35.

sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli).²⁴

Kritik sumber terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan. Dalam kegiatan kritik sumber, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada tahap ini penulis juga melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat.

c) Analisis Sumber (Interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Dalam tahap ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Oleh sebab itu di dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah, karena unsur subyektivitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa, zaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial, dan agama yang melingkupi penulisannya. Untuk itu analisis sumber perlu dilakukan dengan

²⁴ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 99.

menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya antara satu sumber dengan sumber lainnya.²⁵

d) Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulisan sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu ceritera sejarah, misalnya prinsip sereliasasi (cara membuat urutan peristiwa) yang mana memerlukan prinsip-prinsip, seperti prinsip kronologi (urutan waktu), prinsip kaukasi (hubungan dengan sebab akibat) dan bahkan juga kemampuan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa) yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman. Jadi, membuat semacam analogi antara peristiwa di waktu yang lampau dengan tindakan yang telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri di waktu sekarang, terutama bagi peristiwa-peristiwa yang sulit dicari dasar kronologi dan kaukasi dalam penghubungnya.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkap secara komperhensif. Adapun pendekatan yang akan

²⁵ *Ibid*, hlm. 22.

²⁶ *Ibid*, hlm. 25.

dilakukan oleh penulis dalam memperjelas permasalahan yang terjadi yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis, politik, militer, dan ekonomi. Sartono Kartidirdjo berpendapat bahwa pendekatan politik dimaksudkan untuk menyoroti struktur kekuasaan dan sebagainya.²⁷

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terikat dengan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, tingkah laku, serta keseniannya.²⁸ Pendekatan sosiologis juga bisa dipergunakan untuk melihat konflik dalam suatu masyarakat, bangsa bahkan negara. Pendekatan sosiologis ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui keadaan masyarakat Yogyakarta pada masa reformasi 1998.

Pendekatan militer bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab militer. Melalui pendekatan militer inilah penulis akan memaparkan mengenai tugas-tugas aparat di Yogyakarta pasca reformasi 1998. Pendekatan ekonomi merupakan tinjauan yang mengaitkan pandangan tentang ekonomi yang dibedakan menjadi dua hal, yaitu

²⁷ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 63.

²⁸ Hasan Shadiliy, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 82.

membedakan tulisan dari kejadian dan keadaan ekonomi serta menggambarkan ekonomi masyarakat dalam perkembangannya.²⁹

H. Sistematik Pembahasan

Skripsi yang berjudul “Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia 1998” mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua akan dibahas mengenai latar belakang munculnya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Berawal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada Juli 1997 hingga berbagai macam praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

Dalam bab ketiga akan dibahas mengenai peranan mahasiswa Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Penulis akan memaparkan peranan mahasiswa Yogyakarta dari proses, kronologi sampai berbagai aksi serta keikutsertaan warga Yogyakarta dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998.

²⁹ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: FASCO, 1996, hlm. 14.

Dalam bab keempat kemudian akan dibahas mengenai dampak dari perjuangan mahasiswa dalam reformasi pada tahun 1998 di Indonesia. Perjuangan para mahasiswa dalam reformasi tentunya mempunyai berbagai dampak terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat di Indonesia pada tahun 1998. Adapun dampak yang akan dipaparkan oleh penulis meliputi dampak ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan. Dan dalam Bab kelima berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis.

BAB II

LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA PADA TAHUN 1998

A. Krisis Ekonomi

Krisis ternyata menjadi salah satu penyebab yang signifikan bagi tumbuhnya aksi *demonstrasi*¹ mahasiswa Indonesia ditahun 1998. Krisislah yang menyebabkan segalanya seperti tampak menjadi buruk. Yang menjadi pemicu langsung munculnya aksi mahasiswa ialah krisis moneter yang mulai menimpa perekonomian Indonesia sejak Juli 1997. Namun krisis moneter tersebut tidak berdiri sendiri. Banyak pihak yakin, krisis di sektor ini muncul akibat adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah.²

Selama sepuluh tahun sebelum krisis, ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi dua kali lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah,

¹ Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. *Tersedia pada http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa. Diakses pada tanggal, 7 Maret 2012.*

² Zamroni, A. & Andin, M, *Pahlawan Reformasi: Catatan Peristiwa 12 Mei 1998*, Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1998, hlm. 5

dengan APBN yang berimbang, kebijakan ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada migas), dengan kebijakan neraca modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Kesuksesan pembangunan ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit itu. Proses swastanisasi/privasisasi dari dengan mekanisme deregulasi diliputi visi dan semangat liberal. Dalam waktu yang sangat singkat banyak bermunculan bank-bank swasta di seluruh tanah air dan bertaburan korporasi-korporasi swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di sisi lain, terdapat banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah lagi, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup (*undercapitalized*) atau kekurangan

modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai penguat ekonomi, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

Krisis moneter ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia pada masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat ialah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang relatif rendah, neraca pembayaran keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun dibalik ini terdapat kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian masuknya dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di jamin. Namun semua kelemahan ini masih dapat ditampung oleh perekonomian nasional.³

³ Lepi T. tarmidi. *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*. hlm. 1. Tersedia pada www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2.../bempvol1no4mar.pdf. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

Krisis moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand yaitu Bath terhadap Dollar US. Selama itu, mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. *Devaluasi*⁴ mendadak dari Bath ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini. Krisis seperti tak ingin berhenti. Pada September 1997, pemerintah terpaksa mengumumkan menunda mega proyek senilai Rp39 Triliun di dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Meski demikian, laju AS\$ makin tak terbendung. Pada 6 Oktober 1997, rupiah mencapai Rp3.845 / AS\$ untuk seterusnya makin merangkak naik melampaui ambang batas psikologis.⁵

Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju kebangkrutan. Yang pertama adalah akumulasi hutang luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, yang berasal dari hutang swasta. Sebab yang kedua adalah, kelemahan pada sistem perbankan. Ketiga adalah masalah pemerintahan. Kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis yang dianggap gagal, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial yang cepat. Yang keempat adalah

⁴ *Devaluasi* adalah penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas (misal untuk memperbaiki perekonomian). Tersedia pada <http://www.artikata.com/arti-325108-devaluasi.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2012.

⁵ Nusantara, A. Ariobimo dkk, *op. cit.*, hlm. 24.

ketidakpastian politik menghadapi pemilihan umum dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.⁶

Tidak ada solusi untuk mengatasi krisis itu, akhirnya pemerintah secara berani memutuskan meminta bantuan IMF. Permintaan itu resmi diajukan pada 8 Oktober 1997. Tidak harus lama menunggu, IMF memberi persetujuannya membantu Indonesia keluar dari kemelut ekonomi dengan paket bantuannya senilai AS\$ 43 miliar yang akan dicairkan secara bertahap.⁷ IMF, yang dasar pendiriannya adalah hasil kesepakatan konferensi Bretton Woods AS pada tahun 1944, didirikan sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk pemerintah dari berbagai negara-negara di dunia. IMF beroperasi atas dasar kontribusi 182 negara anggotanya. AS merupakan kontributor terbesar, yaitu sekitar 18 persen dari total keseluruhan dana IMF.

Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah merekonstruksi sektor ekonomi di bidang finansial. Sementara itu pemerintah Indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF.

⁶ Lepi T. tarmidi, *op cit.*, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

Program bantuan IMF pertama ditandatangani pada 31 Oktober 1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang. Adapun keempat bidang yang disarankan oleh IMF yaitu, penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan penyesuaian struktural. Untuk menunjang program tersebut, IMF akan mengalokasikan US\$ 11.3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Disamping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih kurang US\$ 37 milyar. Namun bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyaratkan oleh IMF.

Setelah krisis moneter ini menampakkan diri dengan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi dan barang yang sulit di dapat, pengangguran bertambah banyak serta angka putus sekolah mulai meningkat, masyarakat mulai gelisah dan menggugat. Di sisi lain, mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, ikut terimbas. Dan rupanya, kali ini mereka tidak sekadar berempati, melainkan juga secara nyata-nyata mereka sendiri ikut tertimpa pengaruh buruk itu. Belasan ribu dari mereka yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta tak terkecuali yang kuliah di luar negeri terancam tidak dapat melanjutkan studi akibat melambungnyanya harga kertas, alat-alat praktikum, biaya kuliah, dan biaya hidup sehari-hari yang terjadi secara tiba-tiba.⁸

⁸ Zamroni, A. & Andin, M, *op. cit.*, hlm. 6.

Wajah buruk lain yang turut membentuk situasi kondusif bagi munculnya aksi ialah terungkapnya utang luar negeri Indonesia dengan jumlah sangat besar, yakni lebih dari 138 miliar dolar AS, yang sebagian besar dimiliki oleh swasta yang terdiri dari konglomerat-konglomerat karena pengistimewaan fasilitas dan monopoli.⁹ Hal itulah yang menguatkan para mahasiswa di Indonesia untuk melakukan demonstrasi serta aksi yang mengkritik tindakan tersebut. Disamping hal itu juga terdapatnya praktek korupsi, kredit macet di bank-bank negara, tingginya angka kebocoran dana pembangunan, banyaknya pelarian modal ke luar negeri serta kerjasama antara BUMN dan pihak swasta yang selalu merugikan pemerintah membuat masyarakat mengalami imbasnya.

Masyarakat dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis moneter. Dari harga barang yang mulai merangkak naik dengan pendapatan masyarakat yang relatif kecil dan tetap hingga ditambah lagi banyak terjadi PHK yang dialami masyarakat. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah secara umum sudah menjadi kenyataan yang sulit diterima. Mulai dari kesulitan menutup APBN, harga barang naik, hutang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM dan tariff listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban hutang yang tinggi, pertokoan menjadi sepi, PHK dimana-mana, investasi menurun

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

karena impor barang modal menjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak dan laju inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir.¹⁰

B. Krisis Intitusi

Sementara itu berbagai kenyataan politik dan hukum yang buruk juga banyak tergelar di hadapan masyarakat: penggalakan dwi fungsi ABRI yang menyebabkan jabatan sipil banyak dikuasai oleh kaum militer, perekrutan tenaga untuk jabatan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat (DPR/MPR) dengan gaya nepotistik, pembatasan terhadap pers, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis prodemokrasi, rekayasa atas beberapa kasus kriminal yang diduga kuat melibatkan anak pejabat dan aparat, pengabaian para pejabat terhadap putusan PTUN, intervensi dan pengaturan eksekutif terhadap badan legislatif dan yudikatif, pembiaran atas praktek mafia hukum, dan lain-lain.¹¹

Tanggal 31 Maret 1998, di kampus UI Depok diadakan dialog antara mahasiswa dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Dalam dialog tersebut dibahas membicarakan keprihatinan akan krisis yang menimpa bangsa. Dalam situasi krisis seperti sekarang, sikap kaku dan prosedural DPR hanya akan makin menunjukkan bahwa sedang ada krisis institusional di bidang demokrasi perwakilan. Krisis institusional ini sebenarnya datang dari lembaga DPR sendiri. Sebab, lembaga perwakilan rakyat ini

¹⁰ Lepi T. Tarmidi, *op cit.*, hlm. 17.

¹¹ Zamroni, A. & Andin, M, *op. cit.* hlm. 8

kehilangan kesadaran dan kepercayaan diri, karenanya juga tidak mempunyai kekuatan mempertahankan diri. Krisis institusi tampak dalam ketidakmampuan DPR untuk mengambil keputusan. Karena tidak dapat mengambil keputusan, DPR juga tidak dapat mengadakan pembicaraan atau dialog. Hal ini akan membuat DPR kehilangan legitimasinya.¹²

Dalam situasi krisis dewasa ini, mahasiswa atau kelompok masyarakat lain sulit mempercayai DPR yang sedang dilanda krisis institusi. Mereka lebih percaya pada kekuatan-kekuatan intermedier seperti Amien Rais atau intelektual kampus lainnya.¹³ Dengan munculnya kekuatan intelektual itu, DPR mau tidak mau makin kehilangan kewibawaannya.

Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Yogyakarta, masing-masing mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) di kampus Condong Catur dan kampus jalan Cik Di Tiro, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” di kampus Ring Road Utara, serta mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI), melakukan “Ruwatan DPR”. Namun dari empat aksi demo, tidak terjadi insiden. Acara “Ruwatan DPR” menjadi menarik karena mahasiswa meruwat para anggota Dewan agar kesialan mereka hilang. Selama ini mereka menilai anggota DPRD Yogyakarta mengantuk saat rapat berlangsung, kurang berani mengemukakan pendapat, serta tidak proaktif terhadap situasi yang

¹² Sindhunata, *Mendobrak Pintu Krisis*, Basis, Nomor 05-06, tahun ke 47, Mei-Juni 1998, hlm. 7.

¹³ *Ibid*

berkembang di masyarakat. Di Jakarta, sekitar seratus mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISP) Lenteng Agung, menggelar mimbar bebas di halaman kampus IISP. Meskipun turun hujan lebat, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa IISP menuntut segera melakukan reformasi yang nyata dan meminta agar pemuka masyarakat menentukan sikapnya dengan tegas.¹⁴

C. Krisis Kepercayaan

Kepercayaan adalah nilai dasar utama baik dalam hubungan personal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang kehilangan kepercayaan akan sulit berhubungan satu sama lain.¹⁵ Hampir dapat dipastikan, rezim Orde Baru membudayakan suatu sistem kekuasaan represif. Penguasa melalui intervensi birokratis, menerapkan mekanisme kontrol yang berlebihan dalam pengembangan nilai-nilai hidup masyarakat. Aksentuasi pada pertumbuhan ekonomi membudayakan penganaktirian keadilan dan respon terhadap hak asasi manusia, serta pembekuan suara-suara kritis menuju demokratisasi. Dalam rentang waktu yang bersamaan, hukum dan keadilan menjadi prinsip tambahan. Derap pembangunan bersifat sentralistis dan diorkestrasi dari pusat kekuasaan. Terdapat ketimpangan sosial yang tajam. Corak keserakahan dalam pembangunan mengakibatkan hasil yang hanya dinikmati oleh segelintir

¹⁴ Tim Kompas, *Lahirnya Gerakan Reformasi Di Indonesia*, Jakarta: DPP. Forum Komunikasi Anak Bangsa, hlm. 10.

¹⁵ Sindhunata. *Op. cit.* hlm. 8.

orang. Tidak sedikit rakyat yang menjadi tumbal pembangunan. Di sisi lain, publik di hasut dengan janji-janji agar mereka tetap sabar menunggu. Hal tersebut merupakan suatu karakter budaya berpolitik yang membius. Ketatnya kontrol birokrasi penguasa Orde Baru merambah jauh hingga upaya-upaya pemandulan kreativitas publik dalam dimensi kulturalnya.¹⁶

Namun di mata rakyat, implementasi politik Orde Baru dianggap mengulang kesalahan Orde Lama, bahkan menambah beban penderitaan rakyat. Jika Soekarno pada masa Orde Lama dikenal sebagai penguasa politik, maka Soeharto di masa Orde Baru lebih dikenal sebagai penguasa politik, ekonomi, militer dengan kuasa tritunggal yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Budaya represif militeristik Orde Baru kembali mereduksi demokrasi ke dalam struktur hierarki militer dan pembekuan aktivitas berpikir kritis masyarakat.¹⁷ Maka dari itulah masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pada akhir pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan semakin merosot sampai titik yang sanagat rendah. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semata-mata tidak datang secara mendadak karena krisis ekonomi, tetapi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, setahap demi setahap yang disebabkan oleh adanya penyimpangan-penyimpangan dan

¹⁶ Adrian Nabung, *Dipersimpangan Jalan (Refleksi Transformasi Atas Kebudayaan Menuju Penegakan Hukum dan Rekonsiliasi)*, *KKN dan Perjuangan Mahasiswa*, ISSN, 2000, hlm. 14-15.

¹⁷ Maxi Dae, *Mahasiswa dan Perjuangan Politik Yang Memihak*, *KKN dan Perjuangan Mahasiswa*, ISSN, 2000, hlm.20.

kekurangan-kekurangan dalam bidang non ekonomi. Sebagai contoh penerapan hukum yang dalam banyak kasus terasa tidak adil dan terkesan ada rekayasa yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu, penanganan politik yang tidak fair, tidak sportif, tidak demokratis, termasuk rekrutmen politik yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat dan diwarnai oleh kolusi, nepotisme serta birokrasi yang korup dan kolusif yang sedikit demi sedikit ikut mendorong runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan tersebut dalam banyak hal terjadi karena ulah sekelompok kecil aparat pemerintah dan beberapa kebijakan pemerintah yang sulit dimengerti rakyat.¹⁸

D. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, hal ini terjadi karena negeri ini sedang dalam kondisi pailit. Hal ini terlihat jelas belakangan ini banyak ditayangkan di beberapa stasiun televisi mengenai krisis keadilan, serta bencana alam yang sempat terjadi hampir bersamaan. Selain menyebabkan sebagian sektor perekonomian lumpuh hal itu juga membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terganggu. Dari berbagai macam persoalan yang ada ada segelintir orang yang menyindir tentang lambannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para korban bencana alam. Masyarakat kecil terus didera derita sementara mereka

¹⁸ Darto Harnoko, *Demokrasi Dalam perjalanan Sejarah (Studi Kasus Di DIY 1945-Awal Reformasi)*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, hlm. 113.

yang berpendidikan tinggi serta memiliki jabatan semakin hidup dengan begitu nyaman tanpa sepengetahuan kita mereka mengambil jalan yang tidak halal untuk mendapatkan semua itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme dinegeri ini telah dalam batas kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana tidak karena KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah begitu banyak menguras kekayaan negara.

Korupsi secara garis besar adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan berdasarkan Pasal I butir 4 UU nomor 28/1999, kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Sementara nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹⁹ Jika ditelusuri secara historis, korupsi, kolusi dan nepotisme sebetulnya telah menjadi kebiasaan para pejabat sebuah kekuasaan dimasa lampau. Praktek korupsi dapat dijumpai dimana-mana hampir di seluruh pelosok dunia. Tak peduli negara tersebut kaya atau miskin, negara demokratis, komunis ataupun monarki. Umur korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikatakan setua abad ini.

Hal yang sama terjadi juga di Indonesia. Korupsi yang sedang diperangi sekarang memiliki akar sejarah yang dapat dirunut ke belakang,

¹⁹ Farhan Effendy, *Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme*, Jakarta: Inside, 2000, hlm, 45.

jauh sebelum Indonesia merdeka. Tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa kini, korupsi pun telah menjadi hal yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat. Candra Gautama mencatat bahwa korupsi dan penyelewengan kekuasaan pada masa prakolonial berkait erat dengan struktur kekuasaan masyarakat agraris tradisionl. Raja dalam masyarakat seperti itu merupakan pemilik seluruh tanah dan rakyatnya hanya memiliki hak menggarapnya. Selesai panen rakyat wajib melapor sekaligus mengirim upeti yang dikelola oleh pegawai raja dan diserahkan secara hirarkis, sehingga kerap terjadi penyelewengan jumlah setoran akibat di korup oleh aparat kerajaan. Diperkirakan pranata ini menguat sesudah kekuasaan Mpu Sendok (948 Masehi) hingga Majapahit runtuh pada abad 16.²⁰

Pasca kemerdekaan Indonesia korupsi juga tidak mampu dihentikan. Pemerintahan yang dikomandoi Soekarno juga melakukan praktek-praktek akumulasi uang untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Penasehat presiden atau mantan wakil presiden Moh. Hatta mengomentari tentang hal itu bahwa korupsi sudah menjadi seni Indonesia dan korupsi itu ialah bagian dari kebudayaan. Selama demokrasi terpimpin (1958-1965) peranan pemerintah dalam masyarakat politik, ekonomi dan administratif sangat meluas, bersamaan dengan perluasan itu muncullah banyak peluang untuk korupsi dan penyuapan yang melibatkan para pejabat pemerintah. Korupsi dalam bidang ekonomi pada sekitar tahun

²⁰ *Ibid*, hlm, 3.

1956-57 terlihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kedua, kurs valuta asing goncang, harga-harga naik, gaji resmi mulai tidak mencukupi. Semua kegiatan ini dijalankan atas desakan para kawan presiden yang menginginkan agar ia memegang kekuasaan lebih lama, lebih serius dalam menuntaskan agenda revolusi yang katanya belum selesai.²¹

Peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto pun tak memberikan perubahan apapun terhadap pemberantasan korupsi. Rezim Orde Baru dengan mesin politiknya (Golkar dan ABRI) mengeruk kekayaan negara selama 32 tahun. Soeharto sebagai komandan korupsi, kolusi dan nepotisme selama Orde Baru, hal ini bisa dikatakan mengantarkan negara ini kepintu kebangkrutan. Tanpa sadar prestasi korupsi Indonesia menempati posisi lima besar diantara negara-negara sedunia. Jika diepisodekan ada tiga gelombang generasi praktek KKN yang dibidani oleh presiden Soeharto. Pertama, episode awal kekuasaan dimana Soeharto melibatkan saudara-saudaranya, para keponakan, ipar, besan juga anak-anaknya yang sudah dewasa dalam pemerintahan. Episode kedua dimulai pertengahan tahun 1970-an hingga akhir 1980-an, ketika semua putra dan putrinya sudah besar dan ingin terjun di dunia bisnis secara aktif. Ketiga adalah episode bebas untuk semua, yakni terjadi pada akhir tahun 1980 hingga 1990 akhir. Episode ini berlangsung riuh sebab melibatkan hampir

²¹ Nugroho, *Indonesia Sekitar th. 2000*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm, 154.

semua kroni Orde Baru turun demi penjagaan kekuasaan Soeharto, menjarah secara bersama-sama.

Pelaksanaan praktek KKN tidak hanya di lingkungan elit pemerintahan tetapi juga dalam lingkungan militer. Bagi militer struktur Orde Baru menawarkan kesempatan didalam dunia bisnis yang menguntungkan bagi banyak Jendral dan komandan-komandan dibawahnya. Bagi golongan birokrat, struktur tersebut memberikan peluang bagi tumbuhnya sogok-menyogok dan korupsi kecil-kecilan dalam setiap urusan rakyat yang melibatkan pemerintah.²² Secara rinci, dalam mengumpulkan kekayaan, Soeharto mempraktekkan gaya layaknya seorang bos mafia, seperti mendirikan yayasan, menyalahgunakan fasilitas publik, penyelundupan emas dan barang-barang berharga, impor senjata, berdagang bahan peledak, mencetak uang palsu, menyelundupkan obat-obatan terlarang, penyewaan (monopoli) pesawat pribadi untuk ibadah haji, mengambil alih aset negara menjadi aset pribadi dan kelompok, mengeluarkan Surat perintah untuk kepentingan pribadi. Proses pengkayaan diri sendiri ini membuat ratusan juta rakyat Indonesia miskin bahkan terjerat hutang luar negeri.

Rendahnya gaji menjadi penyebab para pejabat melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, karena kebutuhan akan keluarga atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dirasa masih belum cukup

²² Edward Aspinal, dkk, "The Last Days of President Suharto", a. b. Wisnu Hardana, *Titik Tolak Reformasi Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm, 92.

apabila hanya mengambil dari gaji. Hal tersebut yang mendorong para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan tak jarang dari mereka yang meminta dari uang ekstra.²³ Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa. Selain itu korupsi juga dapat menyebabkan sebuah negara menjadi miskin dan bahkan menanggung hutang yang cukup banyak.²⁴

²³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm, 15.

²⁴ Tim, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2008, hlm, 2.

BAB III

AKSI MAHASISWA YOGYAKARTA MENUNTUT REFORMASI TAHUN 1998 DI INDONESIA

A. Aksi Mahasiswa Yogyakarta Dalam Perjuangan Reformasi 1998

Sebelum krisis menghebat pada awal tahun 1998, gerakan aksi mahasiswa praktis berlangsung sporadis saja. Setelah berakhirnya demonstrasi cukup besar pada tahun 1974, demonstrasi mahasiswa yang sungguh-sungguh serentak dan menyeluruh secara nasional tidak pernah dilakukan. Demonstrasi pada tahun 1980-an, dan awal 1990-an relatif tidak berlangsung massif. Sifat dan ukuran demonstrasi yang demikian memang sangat mungkin dipengaruhi oleh, antara lain, minimnya momentum atau semacam alasan yang tersedia.¹

Krisis moneter mulai melanda perekonomian Indonesia pada bulan Juli 1997 pun, aksi mahasiswa yang mencoba menuntut perbaikan keadaan tidak begitu jelas terlihat. Pada saat krisis mulai merambat naik pada akhir tahun 1997, berita menonjol yang bertiup dari kampus malah terjadinya perkelahian sengit antara mahasiswa dari dua perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat. Baru setelah pada bulan-bulan permulaan tahun 1998 krisis tidak kunjung surut dan justru semakin parah, mahasiswa mulai merapatkan dan merapikan barisan. Krisis memang sudah berada pada taraf yang meresahkan semua orang. Masyarakat sudah tidak bisa bersabar lagi, sementara para pengajar dan guru besar di beberapa

¹ Zamroni, A. & Andin, M, *op. cit.*, hlm.10-11.

perguruan tinggi besar mulai member dukungan kepada mahasiswa. Secara tidak begitu tampak, kalangan informal juga ikut memberikan dukungannya. Namun, dorongan yang membuat mahasiswa lebih berani dan percaya diri barangkali ialah datang dari tokoh-tokoh intelektual yang kritis.²

Berbagai dukungan, baik internal maupun eksternal, momentum yang terbentuk memang sangat memungkinkan terciptanya persatuan dan kekompakan aksi dikalangan mahasiswa. Apa yang mencuat di hadapan mereka seolah-olah merupakan musuh yang harus dihadapi bersama. Setelah sekian lama sulit menemukannya, krisis berikut berbagai pelakunya yang bertingkah semakin gila itulah yang kini menjadi musuh bersama mahasiswa. Bahkan musuh tersebut kali ini menjadi musuh bersama seluruh bangsa.³

Reformasi total, itulah tuntutan para Mahasiswa Indonesia. Tuntutan itu mengalir bagaikan air bah. Tak terbendung. "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan," kata para pengunjuk rasa. Sejak februari 1998, di berbagai kampus di negeri ini, aksi keprihatinan tergelar tanpa putus. Mahasiswa menuntut reformasi ekonomi, politik dan hukum, juga menuntut turunkan harga-harga, pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pergantian kepemimpinan nasional.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴ Octo Lampito dkk, *op. cit.*, hlm. 1.

Tuntutan reformasi semakin deras mengalir justru bersamaan dengan pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR), 1-11 Maret 1998. Peserta aksi terus bertambah, dari ratusan sampai puluhan ribu. Tuntutan “Turunkan Soeharto” pun semakin kencang. Ketika aksi marak, aparat keamanan tidak kuasa meredam, kecuali sebatas membendung agar mahasiswa tidak turun ke jalan. Sebaliknya, para mahasiswa terus berupaya supaya bisa ke luar kampus, long march. Tarik menarik ini membuat situasi semakin panas. Walaupun berisiko, hasrat para mahasiswa untuk turun ke jalan tetap menyala.⁵

Di Yogyakarta, Keluarga Mahasiswa UGM, didukung oleh Keluarga Alumni UGM (Kagama), bahkan menggelar rapat akbar yang dihadiri 15.000 mahasiswa. Aksi serupa digelar juga oleh mahasiswa Janabadra Surabaya (UJB) dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY). Walaupun Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto meminta mahasiswa tak perlu berunjuk rasa, aksi tetap berlanjut. Keluarga Besar Mahasiswa IKIP Yogyakarta (KBMIY), Jumat 5 Maret, menggelar aksi yang dihadiri ribuan orang. Aksi ini didukung oleh mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (IAIN Suka), UII, UJB, STIE Widya Wiwaha, STIE YKPN, UAJY dan IST Akprind. Esoknya, Sabtu 7 maret, giliran IAIN Sunan Kalijaga yang menjadi tuan rumah aksi keprihatinan.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Tiada hari tanpa demonstrasi, termasuk hari libur. Minggu 8 Maret, sekitar 50 mahasiswa dari Kelompok Cipayung Yogyakarta menggelar aksi “Diam Menuntut Perubahan” di Jalan Malioboro. Namun ketika hendak melakukan *long march* ke Alun-alun Utara dicegah aparat. Peserta aksi kemudian dinaikan ke truk diangkut ke Markas Polresta Yogyakarta. Selain itu, enam aktivis diperiksa yaitu Arifan Syafe’I (coordinator aksi), Moh Nasta’in (Ketua Cabang PMII), Widiastuti (Ketua GMNI), Stephanus Makambombu (Ketua GMKI), Azwar Yusuf (Ketua HMI) dan Silvester Lahi (Ketua PMKRI).⁷

Dalam perkembangan, Arifan Syafe’I, sebagai pelaksana lapangan, dijaring pasal 510 KUHP, yaitu melakukan arak-arakan tanpa izin. Kelompok Cipayung protes keras dan menuntut agar Syafe’I dibebaskan dari segala tuduhan. Di samping meminta bantuan LBH Yogyakarta untuk melakukan pembelaan, Kelompok Cipayung juga meminta bantuan kepada Sri Sultan HB X dan pejabat militer. Upaya ini berhasil. Buktinya, perkara Syafe’I yang dijadwalkan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Maret, tidak berlanjut.

Saat itu, dalam pergolakan politik di Indonesia, terdapat dua peristiwa yang sangat kontras. Di pelbagai kampus, mahasiswa terus bergerak untuk melaksanakan reformasi, termasuk dalam pergantian kepemimpinan nasional. Sedangkan di Gedung DPR/MPR, sebagian besar peserta sidang umum jalan terus untuk menjadikan Soeharto menjadi

⁷ *Ibid*, hlm. 1-2.

presiden. Di tengah maraknya tuntutan untuk menurunkan presiden Soeharto, dalam Rapat Paripurna ke-10 Sidang Umum MPR, Rabu tanggal 10 Maret 1998, 923 anggota majelis serempak berdiri dan bertepuk tangan, setelah Ketua MPR RI H. Harmoko mensahkan H. M. Soeharto menjadi Presiden masa bakti 1998-2003.

Usai dilantik menjadi Presiden RI untuk yang ketujuh kalinya, Kamis 11 Maret 1998, Presiden Soeharto mengatakan, dukungan akan menambah keyakinannya bahwa kebijakan dan langkah yang akan diambil, sesuai hati nurani rakyat. Bahkan selama SU MPR, Presiden Soeharto mengaku memprihatinkan dengan penuh dan hati yang lapang semua kritik, baik halus, samar-samar, maupun yang keras. Presiden Soeharto juga mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang mengatasi krisis dengan menjalankan hidup prihatin untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari.

Pidato Presiden Soeharto tersebut malah disambut dengan unjukrasa besar-besaran, baik dari Yogyakarta, Malang, Solo, Tegal, Semarang, Bandung, Purwokerto, Bogor, Jember, Denpasar maupun Ujungpandang. Bahkan di Surabaya aksi sudah diwarnai dengan bentrokan. Di Yogyakarta, Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM) kembali menggelar rapat akbar di halaman Balairung dan dihadiri sekitar 50.000 mahasiswa. Aksi ini didukung perguruan tinggi lainnya, seperti IKIP Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Janabadra (UJB),

Universitas Atmajaya (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), STIE Kerjasama (Stikers), dan IAIN Sunan Kalijaga.

Rapat akbar tersebut dihadiri juga oleh sejumlah tokoh akademisi. Mereka adalah Prof. T Jacob (mantan Rektor UGM), Prof Dr Koento Wibisono (mantan rektor UNS), dr H Amien Rais MA, Dr Afan Gaffar, dr Riswanda Imawan, Dr Djamaluddin Ancok dan lain sebagainya. Dalam orasinya, Amien Rais mengatakan bahwa tanpa reformasi politik, seluruh rencana reformasi ekonomi pasti kandas. SU MPR tidak mengisyaratkan apa-apa tentang reformasi politik. Tetapi MPR malah menambah kekuasaan ekstra kepada Presiden.⁸

Pasca Sidang Umum (SU) MPR, aksi mahasiswa semakin meluas dan agresif. Mereka menuntut reformasi tanpa harus ditunda lagi. Mereka menginginkan suatu perubahan. Reaksi tersebut diperlihatkan oleh ratusan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Rakyat dan Seni (MPRS). MPRS menggelar Aksi Syukuran Sidang Umum di kampus ISI, Sewon, Bantul. Dalam nuansa seni, MPRS menampilkan simbol-simbol keprihatinan lewat pantomim, musik dan puisi.⁹

Para mahasiswa berang, ketika Mendikbud Prof Wiranto Arismunandar menuding mahasiswa amatiran dalam soal politik.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Karenanya saat Mendikbud melantik Prof Dr Ichlasul Amal menjadi Rektor UGM, Senin 23 Maret 1998, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mempertegas gerakan Mahasiswa menggelar mimbar bebas di halaman Balairung. Mereka menuntut Mendikbud untuk mencabut ucapannya. Upaya mahasiswa meminta pertanggungjawaban dari Mendikbud Wiranto gagal, karena yang bersangkutan telah meninggalkan tempat lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Kekecewaan para mahasiswa agak terobati setelah Prof Dr Ichlasul Amal menemui mereka. Di hadapan peserta aksi, Rektor UGM mengatakan, ia tidak akan mengurangi hak-hak para mahasiswa dan perlu diadakannya dialog antara mahasiswa dengan pemimpin universitas, agar persoalan dapat dipecahkan bersama.

Pada hari berikutnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM dan UNS mendatangi Komnas HAM mengadukan nasib rekan-rekan mereka yang menjadi korban dalam bentrokan dengan aparat di UNS (Solo) dan Unila (Lampung). Para mahasiswa Yogyakarta juga memrotes tindakan represif petugas. Sejumlah mahasiswa yang hendak menggelar aksi ke DPRD DIY dihalau petugas dengan kekerasan. Sebagai protes atas aksi petugas, tujuh mahasiswa menggelar aksi mogok makan.

Meski pelbagai protes sudah dilakukan oleh para mahasiswa, namun bentrokan tetap sulit dihindarkan. Beberapa hari kemudian terjadi bentrokan kembali di Universitas Negeri Solo (UNS) antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Setidaknya 39 mahasiswa mengalami luka-luka,

lima diantaranya harus mengalami rawat inap di rumah sakit. Dari pihak petugas, lima yang mengalami luka-luka. Di samping menggelar aksi, mahasiswa juga menuntut dialog. Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) misalnya, menuntut dialog langsung dengan Presiden untuk membahas krisis sekaligus reformasi. Namun Menko Polkam Feisal Tanjung menegaskan, tuntutan seperti itu tidak mungkin dipenuhi karena semua ada aturannya. Ia menyarankan, sesuai konstitusi, aspirasi sebaiknya disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat daerah maupun pusat. Beda lagi dengan sikap Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto. Dikatakannya, ABRI siap berdialog dengan mahasiswa.¹⁰

Presiden Soeharto tidak menutup peluang untuk berdialog. Pada prinsipnya, dialog dengan Kepala Negara diperbolehkan, karena dalam Demokrasi Pancasila dialog perlu diberikan tempat atau wadah. Namun untuk tahap awal, Presiden menyarankan agar dialog dilakukan dengan para menteri selaku pembantu Presiden di bidang masing-masing. Akhirnya, ajakan dialog yang diprakarsai Eksponen 66 dan dijadwalkan tanggal 4 April 1998, ditolak oleh para mahasiswa. Meski demikian, Menhankam/Pangab Wiranto tetap menawarkan untuk berdialog dengan para mahasiswa.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

B. Insiden 2-3 April 1998

Nasib dialog yang dituntut oleh para mahasiswa belum menentu.pada hari Kamis tanggal 2 April 1998, pecah bentrok antara aparat dengan mahasiswa di Boulevard UGM. Aksi mahasiswa Yogyakarta yang hari-hari sebelumnya berjalan tertib, berubah menjadi insiden hingga menimbulkan korban dari pihak mahasiswa maupun aparat. Aksi yang diprakarsai oleh Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) itu semula tertib. Sebelumnya, peserta aksi berkumpul di kampus Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) UGM kemudian berjalan kaki hendak menuju gedung DPRD. Sesampainya di Gedung Wisma Kagama, mereka dihadang oleh aparat. Setelah terjadi dorong-mendorong, peserta aksi berhasil menerobos blokade aparat. Setiba di Bunderan, aparat kembali menghadang, sehingga terpaksa massa hanya menggelar mimbar bebas di tempat tersebut.¹¹

Di Bunderan, peserta aksi terus bertambah. Selain mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti UII, UJB, UMY, IKIP, IAIN, UAJY, USD, aksi ini diikuti juga oleh sekelompok pelajar SMU yang tergabung dalam Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI), serikat pengamen serta elemen masyarakat lainnya. Setelah cukup lama menggelar orasi, mahasiswa bergerak hendak ke DPRD Yogyakarta. Namun sesampainya di sekitar perempatan Terban dihadang oleh aparat. Kembali terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan peserta aksi. Ketika pemimpin

¹¹ *Ibid.*

aksi memberi aba-aba untuk maju empat langkah dari posisi semula, mereka segera membentur penjagaan petugas.¹² Dari sinilah awal terjadinya insiden karena petugas mulai memukuli para peserta aksi dengan kayu serta menyemprotkan air dan gas air mata. Massa yang panik bubar dan melarikan diri masuk ke kampus sambil melempari batu kearah petugas. Namun petugas terus mengejar, termasuk membalas lemparan batu. Akibat insiden tersebut, 17 orang pingsan, 26 korban dirawat di RS Panti Rapih dan dua lainnya di RSUP Dr Sardjito, kemudian 43 korban yang luka ringan dirawat di P3K UGM. Selain itu juga, tiga kendaraan rusak parah, yakni truk milik POLRI, kendaraan Isuzu Panther dan Toyota Kijang milik Kapten CPM Napitupulu, Pasi Lidkrim Denpom IV/2.

Pembantu Rektor III UGM Ir Bambang Kartika menyatakan, meski aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, namun karena berlangsung di UGM, maka pihaknya tetap bertanggung jawab. Ketua Presidium KPRP Haris Rusly Moti juga menyatakan bertanggung jawab atas semua akibat dalam aksi tersebut. Namun badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM dalam pernyataan resminya yang ditandatangani Cahyo Pamungkas meminta agar aparat menyatakan permohonan maaf secara terbuka atas kejadian tersebut. Kapolda DIY Kolonel Pol Drs Bani Siswono menyesalkan terjadinya insiden tersebut. Menurut mereka aksi tersebut sudah tidak murni lagi dari mahasiswa, melainkan ada pihak ketiga yang menunggangi. Aparat telah berusaha persuasif agar peserta aksi tidak turun

¹² Nusantara, A. Ariobimo dkk, *op. cit.*, hlm. 40.

ke jalan, namun karena tidak diindahkan aparat terpaksa bertindak tegas. Ketika di UGM pecah bentrok, ribuan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga juga menggelar aksi. Bahkan nyaris bentrok juga dengan aparat keamanan. Namun bentrokan tersebut dapat dihindari karena kedua belah pihak mampu menahan diri.

Pada hari berikutnya, Jumat, 3 April 1998 bentrokan pecah kembali di Boulevard UGM. Aksi yang diprakarsai oleh Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) semula tertib. Namun, ketika panitia secara resmi membubarkan aksi tersebut, massa menolak untuk membubarkan diri. Mereka bermaksud akan bergerak menuju Alun-alun Utara. Namun kembali mendapat hadangan oleh petugas. Massa yang marah kemudian melempari petugas dengan batu. Mulanya petugas diam. Karena masih dihujani batu, aparat bergerak mengejar peserta aksi. Massa yang panik kemudian berlarian menuju gedung-gedung di sekitar Bunderan UGM. Pada saat itu, aparat bertindak lebih agresif. Mereka mengejar mahasiswa hingga masuk ke ruang-ruang gedung tersebut. Setiap mahasiswa yang ditemui langsung di pukuli menggunakan kayu atau pentungan. Dalam aksi tersebut sedikitnya 33 mahasiswa luka-luka, 25 diantaranya harus dirawat di RSUP Dr Sardjito, delapan lainnya dirawat di RS Panti Rapih. Sementara dari pihak aparat terdapat empat personel mengalami luka-luka akibat lemparan batu hingga dirawat di RS Panti Rapih.

Insiden tersebut juga mengakibatkan puluhan sepeda motor rusak berat, pintu gerbang Kopma (Koperasi Mahasiswa) UGM rusak serta kaca-

kaca di Gelanggang Mahasiswa tidak luput dari kemarahan petugas. Dalam peristiwa tersebut dikabarkan sejumlah mahasiswa hilang dan sebagian ditangkap. Namun belakangan mereka yang dinyatakan hilang berhasil diidentifikasi, sebagian diamankan di Polda dan sebagian lagi kembali ke rumah. Keadaan yang cukup mencekam itu, akhirnya dapat diatasi oleh Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal dan Pembantu Rektor III Ir Bambang Kartika turun tangan bernegosiasi dengan petugas. Massa yang bersembunyi di dalam gedung sekitar Boulevard akhirnya ke luar dan kembali ke rumah.

Walaupun sebelumnya terjadi insiden, Keluarga Mahasiswa UGM tetap menggelar aksi keprihatinan di halaman Balairung. Aksi yang diprakarsai Keluarga Mahasiswa UGM, dan didukung penuh Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal, diikuti sekitar 10 ribu peserta dari semua perguruan tinggi di Yogyakarta. Aksi tersebut awalnya tertib. Aparat juga terlihat menahan diri. Dalam orasinya, mahasiswa mengecam tindakan aparat yang masuk kampus, memukuli mahasiswa dan merusak fasilitas kampus. Namun di tengah aksi tersebut, petugas intel Polres Sleman Serma Yuswo Hadi kepergok tengah memantau jalannya aksi. Sejumlah mahasiswa emosi, lalu memukuli intel tersebut. Amien Rais yang kebetulan lewat di tempat tersebut langsung menyelamatkan Serma Yuswo Hadi dari amukan massa.

Peristiwa tanggal 2-3 April di UGM ternyata mengundang keprihatinan Komnas HAM hingga mereka datang ke kota Yogyakarta.

Tiga anggota Komnas HAM, Bambang W Soeharto, Djoko Soegianto dan Mayjen TNI (Purn) Samsudin datang ke UGM untuk mengumpulkan data seputar peristiwa tersebut. Forum pertemuan yang difasilitasi oleh Senat Mahasiswa UGM dan Tim Advokasi Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta (FKSMY) berlangsung di ruang siding Gelanggang Mahasiswa UGM. Selain menghimpun fakta insiden 2-3 April, pada kesempatan lain, Komnas HAM menjenguk Serma Yuswo Hadi di rumahnya di Kaliurang setelah menerima pengaduan dari ibunda Yuswo. Intel Polres Sleman itu menderita luka parah akibat dipukuli sejumlah mahasiswa saat memantau aksi di kampus UGM.¹³

C. Larangan Politik Praktis

Di saat aksi keprihatinan mahasiswa begitu marak, Mendikbud Wiranto Arismunandar melontarkan pernyataan, melarang mahasiswa berpolitik praktis di dalam kampus. Mendikbud mendefinisikan politik praktis sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut melaksanakan atau mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung suatu pengambilan keputusan politik. Pernyataan Mendikbud langsung mendapatkan reaksi keras dari kalangan tokoh akademisi. Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal, Rektor UI Prof Dr Asman Boedisantoso dan Rektor ISTN Jakarta Prof Dr Soebroto menilai, aksi-aksi mahasiswa selama ini bukan sebagai politik praktis namun sebagai gerakan moral

¹³ Octo Lampito dkk, *op. cit.*, hlm. 5.

yang menyuarakan hati nurani rakyat. Larangan Mendikbud tersebut merupakan upaya untuk meredam aksi mahasiswa. Namun pada kenyataannya aksi mahasiswa tidak dapat dibendung. Bahkan dalam berbagai aksi lanjutan baik di Yogyakarta, Semarang, Solomaupun Jakarta, mahasiswa justru menuntut Mendikbud untuk mundur.¹⁴

Meski sering terjadi bentrok, mahasiswa dan aparat keamanan di Yogyakarta sesaat melaksanakan Salat taubat dan Salat Hajat yang diselenggarakan mahasiswa IKIP Yogyakarta. Mereka memohon agar semua komponen bersatu untuk menyelesaikan krisis. Pada kesempatan itu, dosen IKIP Prof Dr Syafi'I Ma'arif mengatakan, reformasi ekonomi tak mungkin terlaksana tanpa reformasi politik dan sosial budaya. Untuk itu, semua elemen masyarakat, mahasiswa dan aparat harus bersatu melakukan reformasi secara menyeluruh. Ketika aksi semakin merebak, Presiden Soeharto menyatakan, unjuk rasa mengganggu belajar. Kampus dibangun untuk mendidik mahasiswa yang disiapkan menjadi pemimpin bangsa. Karena itu, dengan adanya unjuk rasa di kampus-kampus, mengganggu pelaksanaan belajar mengajar. Namun ajakan Presiden tersebut tidak ditanggapi oleh para mahasiswa, mereka tetap saja menggelar aksi unjuk rasa.¹⁵

Kendati ajakan dialog oleh Menhankam/Pangab tidak sepenuhnya direspon oleh mahasiswa, acara tersebut tetap dilaksanakan di Hall A

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5-6.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

Pekan Raya Jakarta (PRJ), pada Sabtu 18 April 1998 yang dihadiri oleh 15 Menteri, dan diikuti sekitar 250 peserta dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta. Senat Perguruan Tinggi Yogyakarta memang telah sepakat untuk tidak akan menghadiri dialog tersebut. Beberapa nama Menteri yang hadir dalam dialog tersebut adalah, Mendagri Hartono, Menhankam/Pangab Wiranto, Menteri Sosial Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, Menko Ekuin/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Menko Kesra/Kepala BKKBN haryono Suyono, Mendikbud Wiranto Aris Munandar dan Menkeh Muladi.

Dalam dialog tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto menyetujui diadakannya reformasi, namun secara gradual dan bertahap. ABRI bersedia memelopori reformasi tersebut. Senada dengan hal tersebut, Ginandjar Kartasasmita dan mbak Tutut mengatakan, reformasi belum bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Bersamaan dengan acara di Pekan Raya Jakarta, di kampus Dermaga IPB juga dilangsungkan dialog aksi mahasiswa Indonesia. Dialog tersebut dihadiri oleh sekitar 5000 mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, ITB, dan perguruan tinggi lainnya. Menurut Rektor IPB, Soleh Solahudin yang juga selaku fasilitator, dialog tersebut diadakan sebagai uji coba, dan sebagai tanggung jawab bersama mahasiswa dan pemerintah.¹⁶

Tatkala di Jakarta dan Bogor berlangsung dialog, mahasiswa di pelbagai kota tetap menggelar aksi. Di Yogyakarta, aksi digelar Front Aksi

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Mahasiswa Peduli Rakyat (Fampera) yang merupakan gabungan dari pelbagai perguruan tinggi, diantaranya IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jana Badra, Institut Seni Indonesia, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, IKIP Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan nama Universitas Negeri Yogyakarta, dan STPMD. Semuala mereka menggelar aksi di dalam kampus IAIN, namun kemudian turun ke Jalan Laksda Adi Sucipto, sebelah utara kampus.

D. Rapat Akbar Masyarakat Yogyakarta

Bertepatan dengan hari Kartini 21 April 1998, Yogyakarta kembali disemarakan oleh demonstrasi besar-besaran. Segenap elemen masyarakat seperti dosen, rohaniawan-rohaniwati, pemuda, pelajar, seniman, pengamen, dan ibu-ibu Dharma Wanita menyatu di depan gedung Sabha Pramana UGM. Peserta aksi yang mencapai 15.000 orang lebih bergabung dalam Rapat Akbar Masyarakat Yogyakarta. Turut bergabung kelompok mahasiswa yang biasanya melakukan aksi demonstrasi seperti Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Kesatuan Rakyat Peduli Indonesia (KRPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan lain-lain. Aksi serupa juga digelar di kota Bandung yang diwarnai dengan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan.

Dua hari kemudian, mahasiswa Yogyakarta berhasil menguasai Jalan Gejayan. Aksi ini dikoordinir oleh Fampera. Pada saat yang sama,

Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SMUR) menggelar aksi di kampus Universitas Cokroaminoto (UCY). Di Universitas Gadjah Mada (UGM) diadakan mimbar demokrasi yang selain diikuti oleh para mahasiswa juga diikuti oleh segenap elemen masyarakat. Dan hari berikutnya, Boulevard UGM dipenuhi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Di tengah maraknya aksi, Mendikbud Wiranto Aris Munandar berencana mengunjungi kampus untuk melakukan dialog dengan para mahasiswa. Namun ajakan tersebut di tolak oleh para mahasiswa yang menginginkan tindakan nyata untuk mengatasi krisis yang sedang melanda.¹⁷

Aksi keprihatinan ternyata bukan hanya milik mahasiswa semata. Bertepatan pada tanggal 1 Sura atau tanggal 28 April 1998, 102 siswa berseragam SLTA dari 20 SMU di Yogyakarta yang tergabung dalam Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI) menggelar aksi di Boulevard UGM. Sambil mengusung keranda mayat yang bertuliskan 'Mayat Demokrasi', mereka menuntut diturunkannya harga buku, naikkan kesejahteraan guru, dan dilakukan reformasi disegala bidang. Aksi yang digelar GAPCI ini ternyata juga diikuti oleh beberapa guru. Dalam orasinya, para guru mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu susah, mendapat gaji kecil dan kurikulum yang membosankan karena belum diubah-ubah saat itu.

¹⁷ *Ibid.*

Sehari sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa untuk Reformasi (Bahari) juga menggelar unjukrasa di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aksi juga dilakukan di Akademi Akuntansi YKPN. Dalam orasinya, mahasiswa mengungkapkan kesulitannya membayar SPP atau biaya pendidikan akibat krisis moneter. Pada tanggal 29 April 1998, ribuan mahasiswa dari 20 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar ‘Musyawarah Akbar Mahasiswa Yogyakarta’ di kampus IKIP Karangmalang. Aksi damai yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta (FKSMY) itu menghasilkan Deklarasi Mahasiswa Yogyakarta yang di antara lain menuntut Soeharto turun dan segera diadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Deklarasi ditandatangani oleh 20 Ketua Senat perguruan tinggi di Yogyakarta.¹⁸

E. Aksi Massa Nonkampus

Aksi mahasiswa semakin kuat karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demonstrasi turun ke jalan menjadi semacam tantangan. Kendati aparat keamanan bertindak semakin agresif. Akibatnya, korban berjatuhan di mana-mana. Bahkan di Yogyakarta, Medan dan Jakarta sampai menimbulkan korban tewas. Namun hal tersebut tidak membuat mahasiswa gentar, tetapi justru semakin berani dan bersemangat. Di Yogyakarta sendiri, giliran massa di luar kampus yang berbicara. Komnas

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menggelar aksi damai di pelataran masjid Besar Kauman. Aksi tersebut merupakan kali pertama yang diselenggarakan elemen luar kampus. Tidak tanggung-tanggung, Imam masjid, KH Haiban Hadjid dan Wagiman Jenggot (ayah almarhum wartawan Muhammad Fuad Syariffudin alias Udin), ikut berorasi.

Aksi yang digelar pada tanggal 1 Mei 1998 itu dihadiri oleh 1000 orang yang terdiri dari jamaah shalat Jumat, mahasiswa, pelajar termasuk anak-anak dan warga sekitar Kauman, Yogyakarta. Pada aksi itu, KH Haiban Hadjid tampil di mimbar, dan dalam pidatonya antara lain mendukung aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa, karena mahasiswa menuntut dan menyerukan ke arah yang lebih baik. Selain KH Haiban Hadjid, ikut berpidato seorang ibu-ibu warga Kauman bernama Mardiyem, kemudian ketua Senat Mahasiswa UGM Ridaya La Ode Ngkowe, dokter Faizal AR Fachruddin, ketua Senat Mahasiswa UII Ridwan Baswedan dan Dosen UII Busyro Muqodas, SH, M. Hum. Dalam pidato itu, pada umumnya mereka mendukung apa yang selama ini diteriakkan oleh para mahasiswa dalam aksi reformasi.¹⁹

Aksi damai juga digelar di kampus UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan Kampus Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII). Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif

¹⁹ Darto Harnoko, *Demokrasi Dalam perjalanan Sejarah (Studi Kasus Di DIY 1945-Awal Reformasi)*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, hlm. 117.

listrik. Putusan tersebut rupanya menjadi pemicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di tanah air.²⁰ Bentrokan terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan saat mahasiswa Universitas Cokroaminoto (UCY) melakukan aksi jalan mengitari kampus. Akibatnya, 11 mahasiswa mengalami luka-luka dan 3 petugas cidera terkena lemparan batu. Unjuk rasa mahasiswa di Universitas Pasundan, Bandung dan IKIP Medan juga terjadi bentrokan.

F. Bentrok di Gejayan, Yogyakarta

Selasa, 5 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma (USD), IKIP Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jana Badra (UJB), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan sejumlah perguruan tinggi lain di Yogyakarta berkumpul dan menduduki Jalan Gejayan setelah sebelumnya menggelar aksi di kampus USD. Bentrokan itu bermula ketika peserta aksi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu lebih bertahan di Jalan Gejayan (sebelah timur kampus IKIP Yogyakarta dan barat kampus USD), sejak pukul 11.00 WIB. Meski panitia secara resmi telah menyatakan aksi selesai sekitar pukul 17.30 WIB, sebagian besar massa tetap bertahan. Pukul 18.00 WIB petugas kemudian membubarkan paksa dengan menyemprotkan gas air mata ke arah peserta aksi.

²⁰ Octo Lampito dkk, *op. cit.*, hlm. 10.

Peserta aksi yang panik berlarian sambil membalas dengan melempar batu ke arah petugas. Petugas pun mengejar mereka hingga ke perkampungan penduduk. Semakin malam keadaan di Gejayan semakin mencekam karena aparat terus mencari para mahasiswa. Begitu bertemu dengan mahasiswa langsung dipukuli dan diseret. Tidak hanya itu, penduduk sekitar pun juga menjadi korban pemukulan aparat keamanan. Tidak hanya itu, motor-motor yang diparkir di sekitar kampus IKIP Yogyakarta dan USD menjadi sasaran pentungan petugas hingga puluhan mengalami rusak berat. Sedikitnya terdapat 15 peserta aksi mengalami luka-luka dan 10 diamankan.

Menjelang tengah malam, ketegangan mulai mereda. Penduduk sekitar Gejayan dan Samirono ke luar rumah, membakar ban dan meletakkan berbagai benda di tengah jalan. Berbagai fasilitas umum seperti rambu-rambu lalu-lintas, tiang listrik, telepon umum dirusak dan diletakkan di tengah jalan. Dalam aksi pendudukan Gejayan, massa sempat meyandera Ketua DPRD DIY Subagyo Waryadi dan anggota Fraksi ABRI Kolonel Sriyono karena tidak bersedia mengantarkan peserta aksi berjalan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun saat bentrokan meletup, mereka telah diamankan panitia aksi di gedung rektorat kampus Universitas Sanata Dharma (USD).

Tiga hari berikutnya bentrokan di Gejayan terulang kembali. Bentrokan tersebut lebih besar dari pada yang sebelumnya terjadi. Bahkan akibat kejadian tersebut, Mozes Gatotkaca ditemukan tewas di sebelah

utara Hotel Radison. Korban mengalami retak di tulang tengkorak, ujar dokter RS Panti Rapih, dr Jatmiko Soedono SpB, yang mengaku menerima pasien tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Mozes ditemukan di dekat kios pon Mrican oleh Tim P3K USD dan kemudian diangkut dengan menggunakan mobil ambulance ke RS Panti Rapih.

Mozes Gatotkaca berumur 40 tahun, seorang teknisi komputer diduga kuat meninggal dunia akibat kebrutalan aparat keamanan. Mozes meninggal di Yogyakarta setelah dihajar oleh beberapa orang berseragam pada tanggal 8 Mei 1998.²¹ Menurut pengakuan rekan-rekannya, Mozes sebenarnya tidak mengikuti unjukrasa. Alumnus Akprind yang tinggal di gang Brojolamatan 9 A ini bersama rekannya hendak membeli nasi di warung sekitar Mrican. Namun sial, ia terjebak dalam kerumunan massa yang saat itu tengah bentrok dengan aparat keamanan, hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Belakangan keluarganya menempuh jalur hukum melalui LBH Yogyakarta dan menuntut pertanggungjawaban Pangab.

Seperti sebelumnya, bentrokan bermula ketika massa yang berkumpul di Gejayan tidak mau membubarkan diri hingga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh aparat keamanan. Akhirnya aparat maju dan membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Terjadi perang batu dan aparat terus memburu peserta aksi hingga masuk ke kampus IKIP Yogyakarta dan rumah-rumah penduduk. Akibat dari

²¹ Zamroni, A. & Andin, M, *op. cit.* hlm. 21.

kejadian ini puluhan orang mengalami luka-luka, dan sedikitnya 25 ditangkap serta puluhan motor rusak. Hingga larut malam keadaan masih saja mencekam, perusakan fasilitas umum tidak hanya terjadi di Jalan Gejayan dan Colombo saja, namun meluas hingga ke Jalan Adi Sucipto. Fasilitas telepon umum, pengatur lalu-lintas dan satu minibus dibakar massa. Puluhan pot-pot dan pohon-pohon robohkan di tengah jalan. Perusakan fasilitas umum tersebut terus berlanjut. Sabtu 9 Mei 1998, di Jalan Adi Sucipto terjadi bentrokan antara mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dengan aparat keamanan.²²

Dugaan resiko itulah yang kemudian terbukti dari terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh pihak yang membaonceng aksi mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota lain. Maka, menyusul bentrokan berdarah di Yogyakarta, Kapolda DI Yogyakarta kol. (Pol.) Drs. Bani Siswono mengeluarkan aturan baru, membatasi demonstrasi mahasiswa di seluruh wilayah DI Yogyakarta hanya sampai pukul 14.00 WIB. Selebihnya, aksi akan dibubarkan tanpa negosiasi lagi dengan penanganan bertingkat dari semburan air, gas air mata, penggunaan peluru karet, dan jika perlu menggunakan peluru tajam. Pernyataan ini terpaksa dikeluarkan karena aksi keprihatinan selama dua hari, dari tanggal 5 hingga 6 Mei itu berubah menjadi aksi perusakan fasilitas umum, tanpa tahu lagi siapa pelaku perusakan sesungguhnya.²³

²² Octo Lampito dkk, *op. cit.*, hlm. 11.

²³ Nusantara, A. Ariobimo dkk, *op. cit.*, hlm. 46-47.

G. Mahasiswa Berkabung

Gugurnya empat pahlawan reformasi dalam tragedi di kampus Trisakti 12 Mei 1998, tidak membuat mahasiswa surut. Mahasiswa tetap semangat. Sehari setelah tragedi itu, seluruh mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, Palembang dan sejumlah kota besar lainnya serentak menggelar aksi berkabung sebagai wujud solidaritas atas nasib rekan mereka yang mati ditembak aparat. Sementara, pihak aparat juga tidak mengendurkan penjagaannya terhadap mahasiswa yang hendak turun ke jalan. Bahkan petugas masih saja melakukan tindakan represif guna menghalangi niat peserta aksi. Dalam sepekan sejak kejadian Trisakti, bentrokan masih mewarnai aksi-aksi mahasiswa di berbagai kampus. Bahkan bentrokan itu semakin dasyat hingga berbuntut kerusuhan di berbagai kota. Kekuatan mahasiswa juga semakin besar karena mendapat dukungan elemen luar kampus. Aksi turun ke jalan akhirnya tidak dapat dicegah lagi.

Di Yogyakarta, aksi mahasiswa yang diprakarsai Komite Perjuangan Rakyat untuk Reformasi (KPRP) berakhir dengan bentrokan. Sedikitnya 39 mahasiswa harus dirawat di rumah sakit, sementara 100 orang diamankan di Mapolda DI Yogyakarta. Dua orang terkena tembakan petugas, yakni, Ivan (mahasiswa UGM) dan Parjiman (karyawan UGM), sehingga harus dirawat di RS Sardjito. Sedang 49 korban yang luka ringan

akibat terkena pentungan petugas dan gas air mata di rawat di P3K Universitas Gadjah Mada (UGM).²⁴

Bentrokan tak terhindarkan lagi ketika mahasiswa yang menduduki Jalan Kaliurang, tepatnya depan Kampus MIPA UGM, merangsek dan menerobos blokade barisan petugas keamanan. Petugas menyemprotkan gas air mata, dan mahasiswa membalas dengan lemparan batu. Petugas pun membalas lagi dengan lemparan batu dan tembakan. Suasana mencekam tersebut berlangsung hingga malam hari. Petugas yang secara khusus mendatangkan pasukan Gegana (Kesatuan Brigade Mobile) dari Jakarta terus mencari mahasiswa hingga masuk ke dalam fakultas-fakultas. Mereka juga melakukan pengrusakan terhadap sejumlah bangunan di kompleks UGM. Setiap bertemu dengan mahasiswa, langsung ditangkap, dipukuli dan diangkut. Bahkan Pembantu Rektor III UGM, Ir Bambang kartika sempat ditodong pistol oleh petugas. Namun kemudian dilepaskan setelah yang bersangkutan adalah pembantu rektor.²⁵

Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal pun turun tangan. Malam itu juga Rektor langsung mendatangi mapolda DIY guna membebaskan mahasiswa yang ditahan. Namun pihak Polda hanya mengizinkan mahasiswi yang dibebaskan, sedang mahasiswa masih dibutuhkan untuk didata. Kadit Serse Polda DIY Letkol Pol Drs Erwin TPL Tobing, mengakui pasukan Gegana yang bersepeda motor menggunakan peluru

²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

²⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

karet, sedang petugas Dalmas hanya dipersenjatai pentungan untuk menghalau massa.

Hari itu tanggal 13 Mei 1998, sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta seperti UAJY, UPN veteran, IAIN Sunan Kalijaga dan lain sebagainya menggelar aksi berkabung atas gugurnya empat mahasiswa Trisakti. Bahkan di kampus Universitas Airlangga Surabaya, aksi berkabung ditandai dengan melakukan salat sunah. Di Solo, ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mudrick M Sangidoe menghimbau agar warga Solo mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati gugurnya pahlawan reformasi²⁶ dan ungkapan rasa berkabung. Hari berikutnya, tindakan simpati petugas ini ternyata juga diterapkan di wilayah Bantul. Dipimpin langsung kapolres bantul Letkol Pol Drs Yotje Mende, aparat mengawal mahasiswa STIE Kerjasama dari kampus Jalan Parangtritis menuju kampus Universitas Islam Indonesia di Jalan Tamansiswa. Setelah mahasiswa dua kampus tersebut bergabung dan melakukan orasi, aparat kembali mengawal mahasiswa pulang ke kampus. Aksi dengan pengawalan petugas justru berlangsung tertib dan simpatik.

Pada tanggal 15 Mei 1998, Yogyakarta kembali dimeriahkan oleh aksi massa. Dengan mengendarai motor dan berjalan kaki, ribuan massa memadati jalan-jalan utama sambil meneriakkan tuntutan reformasi dan turunkan Soeharto. Tidak jelas bermula dari mana, seusai Salat jum'at, massa sudah bergerombol di tiap sudut jalan. Sementara toko-toko, baik di

²⁶ *Ibid*, hlm. 18.

kawasan Malioboro maupun jalan Solo tutup. Hampir setiap toko terpampang tulisan mendukung reformasi total. Meski demikian, perasaan was-was masih menyelimuti sebagian pemilik toko karena khawatir jika terjadi kerusuhan.²⁷

Menjelang petang, suasana memang sempat mencekam karena sebagian massa mulai melempari toko yang menjual mobil Timor di Jalan Solo. Namun insiden kecil tersebut tidak berlanjut menyusul kedatangan Sri Sultan Hamengku Buwono X di tengah massa. Dengan berdiri di pintu belakang mobil Toyota Cruiser, Sri Sultan berkali-kali memperingatkan massa agar tidak membuat kerusuhan. Upaya Sultan meredam aksi massa ternyata berhasil. Dan massa pun mengelu-elukan raja Yogyakarta tersebut hingga berkali-kali.²⁸ Sultan juga mengatakan pada dasarnya, pemimpin harus mengabdikan untuk rakyat. Pemimpin, lanjutnya harus berpihak kepada rakyat.²⁹

Pada hari berikutnya, Sri Sultan kembali dapat menenteramkan massa ketika berlangsung aksi unjukrasa di Jalan Hos Cokroaminoto, di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ribuan mahasiswa

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 18

²⁹ Abu Chanif, *Lahirnya Gerakan Reformasi Di Indonesia*, Jakarta:DPP. Forum Komunikasi Anak Bangsa (Fokab). 1998. hlm.193.

dan masyarakat sekitar Wirobrajan dengan tertib mendengarkan pesan Sultan yang mengajak masyarakat untuk terus berjuang.³⁰

H. Aksi Damai Rakyat Yogyakarta

Peristiwa kerusuhan di Jakarta dan Solo membuat aparat keamanan meningkatkan kesiagaan, khususnya dalam menghadapi aksi massa 20 Mei. Gerakan rakyat di Jakarta yang direncanakan akan dipusatkan di sekitar Monas ternyata dibatalkan. Beda halnya dengan Yogyakarta. Aksi rakyat Yogyakarta tetap berlangsung, dan berlangsung dengan damai. Padahal aksi massa tersebut tidak dijaga oleh aparat keamanan. Sepanjang gerakan reformasi, inilah aksi massa terbesar. Aksi ini diselenggarakan oleh Gerakan Rakyat Yogyakarta yang terdiri atas 50 SMPT di Yogyakarta dan berbagai Komite Pergerakan serta elemen masyarakat.

Mahasiswa dan rakyat Yogyakarta memang luar biasa. Intelektualitas dan kesantunan benar-benar tercermin dalam aksi reformasi yang digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, pada hari rabu, tanggal 20 Mei 1998, dan diikuti hampir satu juta orang. Dari berbagai penjuru, massa berduyun-duyun menuju Kraton Yogyakarta, sambil meneriakkan turunkan Presiden Soeharto. Kota Yogyakarta seketika menjadi lautan manusia. Jalan-jalan dipadati oleh mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 500.000 orang. Kemudian ditambah ratusan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat. Semua melebur dalam barisan

³⁰ Octo Lampito dkk, *op. cit.*, hlm. 18-19.

reformasi. Warga lainnya yang berada di sisi jalan yang dilewati oleh peserta aksi pun ikut mengelu-elukan sambil mendukung dan menyediakan minuman, makanan kecil dan nasi bungkus. Kerja sama ini begitu rapi, meski tanpa koordinasi.

Aksi yang rapi, tertib dan memikat itu, berkat kesadaran dan disiplin seluruh peserta aksi. Sebab, masing-masing delegasi punya pengamanan intern, yang didukung penuh oleh satuan petugas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Banser Nahdhatul Ulama, dan Kokam AMM. Secara perlahan-lahan massa bergerak dari 12 titik pemberangkatan menuju Kraton Yogyakarta. Tiap rombongan dari masing-masing titik ini membuat ular-ularan yang sangat panjang. Rombongan dari Universitas Gadjah Mada misalnya, barisan paling depan sudah sampai perempatan Gramedia Jalan Jenderal Sudirman, sedang ekornya atau peserta yang masih pada barisan paling belakang masih berada di dalam kampus, tepatnya di gedung Graham Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada.³¹ Di pelbagai kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Purworejo, Kudus, Jepara dan Magelang diwarnai dengan aksi turun ke jalan dan menuntut agar Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan.

Zaman dahulu aksi tersebut dikenal dengan nama topo pepe. Topo pepe adalah aksi menjemur diri yang dilakukan di Alun-alun kota Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan protes yang khas

³¹ *Ibid*, hlm. 23.

dari tradisi Jawa. Jika warga Kerataon Yogyakarta memiliki persoalan yang tidak terpecahkan, mereka akan melakukan topo pepe sampai mendapat palilah/petunjuk dari Ngarso Dalem, sebutan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Gerakan rakyat ala Yogyakarta ini merupakan gerakan massa terbesar dalam gerakan reformasi selama ini.³²

Disamping itu juga gerakan rakyat Yogyakarta yang di dukung oleh berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut ternyata berlangsung secara damai. Berbeda dengan aksi massa dan demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di kota-kota lain seperti Jakarta, Medan, Solo dan berbagai kota lainnya di Indonesia yang berujung pada kerusuhan dan pengrusakan. Dari berbagai aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa di kota Yogyakarta hanya beberapa yang berujung pada bentrokan dengan para aparat keamanan. Berbagai aksi damai inilah yang menjadikan aksi-aksi demonstrasi di kota Yogyakarta berbeda dan menarik dibandingkan dengan aksi-aksi mahasiswa di kota-kota lain di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari peranan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan para tokoh-tokoh aksi demonstrasi yang mampu meredam emosi dan amarah peserta aksi demonstrasi sehingga berbagai aksi demonstrasi yang digelar di Yogyakarta berjalan tertib dan lancar.

³² Hiro Tugiman, *Budaya Jawa dan Mundurnya Presiden Soeharto*, Yogyakarta: Kanisius, 1999. hlm. 134.

I. Maklumat Sri Sultan dan Sri Paku Alam

Aksi mahasiswa Kagama (Keluarga Alumni Gajah Mada) melibatkan ratusan ribu bahkan hampir satu juta peserta yang kemudian melakukan gerakan menuju Alun-Alun Utara.³³ Dalam *Pisowanan Ageng*³⁴ itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mendukung gerakan reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memikat rakyat. Demikian Maklumat 20 Mei 1998 yang ditandatangani Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam VIII yang dibacakan oleh Sri Sultan dalam Pisowanan Ageng di Kagungan Dalem Pagelaran Kraton Yogyakarta. Pisowanan Ageng yang dihadiri sekitar 1 juta orang, baik mahasiswa maupun rakyat Yogyakarta dan warga kota lainnya berlangsung tertib, khidmad, dan ditutup dengan sambutan massa yang mengelu-elukan nama Sri Sultan.

Melalui maklumat Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam VIII mengajak ABRI dalam persatuan yang kuat untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

³³ Nusantara, A. Ariobimo dkk, *op. cit.*, hlm. 61.

³⁴ Dalam sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat, Pisowanan Ageng merupakan sarana bagi rakyat Yogyakarta untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dahulu Pisowanan Ageng merupakan wujud "hak" pepe, di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke Alun-alun Utara Yogyakarta dan berjemur diri di panas terik matahari. Tindakan pepe dilakukan hingga Sultan datang menemui mereka dan menanyakan apa dan mengapa mereka melakukan laku pepe. Tersedia pada <http://vgsiahaya.wordpress.com/2008/10/29/dilema-pisowanan-ageng/> Diakses pada tanggal, 5 Maret 2012.

Selain itu, mengajak semua lapisan masyarakat dan golongan serta seluruh rakyat Indonesia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila. Terakhir, Sri Sultan dan Paku Alam, menghimbau masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan seluruh Indonesia untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing untuk keselamatan Negara dan Bangsa.

Menurut Sri Sultan, maklumat tersebut dibuat atas dasar tradisi kejuangan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang murni serta dengan berperang pada Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII yang menegaskan persiapan mendukung reformasi dan perjuangannya. Peristiwa bersejarah ini dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan kepergian Sri Sultan HB X dan Paku Alam VIII beserta kerabat yang diiringi dengan musik dan iring-iringan pasukan. Serentak masyarakat diajak bersama-sama mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang kemudian disusul pembacaan Sumpah Rakyat. Adapun Sumpah tersebut berbunyi: Kami rakyat Indonesia, mengaku bertanah air satu tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa yang cinta keadilan. Kami rakyat Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran.

Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Forum Persatuan Umat Beragama yang diwakili oleh lima wakil agama-agama, dan dilanjutkan dengan penyerahan pernyataan kepada Sri Sultan

Hamengku Buwono X yang dilakukan oleh keluarga almarhum Mozes Gatotkaca. Sri Sultan mengemukakan, bahwa kita sedang berada di ujung jalan atau di permulaan jalan baru yang mungkin saja masih panjang yang menuntut peran segenap rakyat guna ikut menghantarkan bangsa ini ke gerbang cita-cita. Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, kedaulatan di tangan rakyat. Juga maklumat 5 September 1945 rakyat Yogyakarta mendukung Proklamasi dan berpihak kepada Republik Indonesia. Maka dengan panggilan sejarah, sekarang segenap komponen masyarakat Yogyakarta tampil mendukung gerakan reformasi nasional bersama kekuatan reformasi yang lain.³⁵

J. Prof. Dr Ichlasul Amal Tokoh Reformasi Damai 1998

Doktor ilmu politik ini akrab dengan dunia pergerakan sejak mahasiswa (Angkatan '66). Bahkan semasa menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada (1998-2002), saat mahasiswa dilarang demonstrasi, dia malah turun demo bersama mahasiswa memperjuangkan reformasi. Oleh para aktivis mahasiswa, dia pun dianugerahi Bintang Jasa Utama Tokoh Reformasi Damai 1999. Pria berdarah Madura kelahiran Jember 1 Agustus 1942, ini menjadi rektor pada saat yang tepat. Dia diangkat Presiden Soeharto jadi rektor setelah mendapat nilai tertinggi dalam pemilihan rektor oleh Senat Universitas. Saat dilantik jadi rektor, mahasiswa sedang mengadakan aksi demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun.

³⁵ *Ibid*, hlm. 24.

Maka dalam buku 50 Tahun UGM di Seputar Dinamika Politik Bangsa, disebut: “Beruntung UGM memiliki Prof Dr Ichlasul Amal. Lelaki kecil dengan nyali besar. Di pengujung rezim Soeharto, di tengah pesona psikologis pergantian milenium yang diharapkan membawa perubahan, dia merupakan figur yang tepat pada saat yang tepat. Dia muncul dengan berani untuk menegakkan demokrasi yang sehat di negeri ini.” Walaupun Pak Harto sendiri, di ujung kekuasaannya masih berupaya merangkul Amal dengan menawarkan jabatan Mendikbud Kabinet Pembangunan Reformasi yang diniatkan menggantikan Kabinet Pembangunan VII.

Setelah Presiden Soeharto lengser, digantikan oleh BJ Habibie, Amal menunjukkan sikap politiknya yang tetap konsisten menyuarakan kepentingan rakyat. Saat itu dia menolak tawaran Habibie untuk menduduki jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan. Kemudian disusul munculnya berbagai partai politik, pakar ilmu politik ini pun mengajak 76 parpol baru berdialog di kampus UGM, dalam acara “Dialog Antarpartai tentang Pemilu”. Namun dia sendiri menolak tawaran bergabung dalam partai politik dengan dalih sebagai pegawai negeri. Lalu, dia juga mencetuskan ide pemantau pemilu sebagai ganti kuliah kerja nyata bagi mahasiswanya.

Selama menjabat rektor, dia membangun hubungan yang cair dengan segenap jajaran di kampusnya. Dia juga mengimplementasikan kebebasan berpikir terutama pentingnya berpikir alternatif. Menurutnya,

berpikir bahwa berbuat sesuatu yang berbeda bukanlah hal yang salah. Sampai alumni S1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM (1967), ini melepas jabatannya, tidak terpilih lagi sebagai rektor, dia tetap konsisten dalam sikap politiknya. Saat melepas jabatan rektornya, dia didaulat sejumlah karyawan dan mahasiswa mengenakan ikat kepala bertuliskan “reformasi” dan mengaraknya dengan andong di seputar kampus.³⁶

K. Titik Demonstrasi Mahasiswa Yogyakarta 1998

Dari berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta yang melibatkan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta terdapat titik-titik pusat yang sering dilakukannya aksi dan protes para mahasiswa di kota Yogyakarta. Adapun beberapa titik yang dimaksudkan ialah Bunderan Universitas Gadjah Mada, Alun-alun keraton Yogyakarta dan IKIP Yogyakarta. Banyak aksi demonstrasi digelar di titik-titik tersebut. Adapun berbagai titik atau tempat lain yang dipakai untuk aksi demonstrasi yaitu jalan Solo, serta di berbagai kampus-kampus lain yang ada disekitar Yogyakarta.

Universitas Gadjah Mada dan IKIP Yogyakarta sering menjadi tuan rumah berbagai aksi demonstrasi karena para mahasiswa di perguruan tinggi tersebut sering menjadi pemrakarsa aksi demonstrasi. Disamping itu

³⁶ Prof. Ichlasul Amal. Tersedia pada <http://cspugm.wordpress.com/organization/prof-ichalsul-amal/>. Diakses pada tanggal 10 September 2012.

juga, banyak para mahasiswa di kampus ini secara terang-terangan dan tegas memperjuangkan tuntutan reformasi. Dari berbagai aksi yang digelar oleh para mahasiswa tidak semua berjalan secara damai dan tertib. Terdapat juga beberapa aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan antara mahasiswa dengan para aparat keamanan yang banyak mengakibatkan korban luka bahkan hingga terdapat 1 korban meninggal dunia, seperti dalam peristiwa di jalan Gejayan, Depok, Sleman, Yogyakarta.

L. Presiden Soeharto Mengundurkan Diri

Di puncak kepemimpinan Orde Baru, para pembantu presiden sendiri mulai membelot. Pada Senin, 18 Mei 1998, di dalam gedung DPR, dengan dikelilingi oleh para mahasiswa yang memang telah memboikot gedung DPR/MPR, Ketua MPR yang juga merangkap sebagai ketua DPR Harmoko mengatakan kepada para mahasiswa agar Soeharto mundur.³⁷ Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mencoba membalikan gelombang aksi yang menentanginya, namun gelombang aksi tersebut telah mencapai ukuran yang besar.³⁸ Presiden Soeharto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari dalam dan luar rezimnya. Mereka menggarisbawahi kekacauan yang semakin meningkat. Soeharto yang sudah terkepung oleh gelombang aksi tersebut melakukan usaha terakhir dengan menjanjikan reformasi, termasuk pembentukan kabinet yang baru, atau sekurang-

³⁷ Donald K. Emmerson, *Indonesia beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm. 553.

³⁸ *Ibid*, hlm. 552.

kurangnya melakukan penyusunan kembali kabinet yang sudah ada. Namun di hari itu juga Menko Ekuin Ginandjar kartasasmita, memberi tahu kepada Presiden Soeharto bahwa para pemegang kunci Orde baru telah menolak usul-usul presiden yang pada hakikatnya bermaksud untuk menyelamatkan kedudukan masing-masing.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Ginandjar dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tandjung mengepalai selusin menteri yang bertanggungjawab di bidang ekonomi menulis surat kepada Presiden Soeharto, menyatakan menolak untuk duduk di dalam kabinet yang akan dirombak sebagaimana dijanjikan oleh Presiden. Bagi presiden Soeharto pembelotan para menteri pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan pukulan terakhir, atau penutupan pintu terakhir dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaan. Pada malam itu juga Presiden Soeharto memutuskan untuk berhenti.³⁹

Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dikenal akrab dengan panggilan Pak Harto, Kamis, 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan itu untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, Wapres BJ Habibie mengangkat sumpah menjadi Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, disaksikan Pak Harto dan undangan lainnya. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia dan TVRI serta disaksikan puluhan

³⁹ *Ibid*, hlm. 535-536.

wartawan dalam dan luar negeri, Pak Harto mengatakan keputusannya untuk berhenti dari jabatannya sebagai presiden setelah memperhatikan keadaan yang berkembang di tanah air dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR serta Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Dengan berhentinya Pak Harto sebagai presiden, maka mulai hari itu Kabinet Pembangunan VII juga ikut berhenti sebagai pembantu presiden.⁴⁰

Pada hakekatnya, tuntutan reformasi tersebut meliputi:

1. Amandemen (perubahan) UUD 1945
2. Penghapusan dwifungsi ABRI
3. Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembrantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Otonomi daerah
5. Kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

⁴⁰ Abu Chanif, *op. cit.*, hlm. 303-304.

BAB IV
Dampak Dari Perjuangan Mahasiswa
Dalam Reformasi Pada Tahun 1998 Di Yogyakarta

A. Dampak Ekonomi

Sejak krisis moneter tahun 1997 perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada memberhentikan karyawannya. Karyawan yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi sebab maraknya aksi para mahasiswa di Indonesia hingga mencapai keberhasilan dalam upaya penurunan Presiden Soeharto.

Rupiah menguat Rp. 500 (5.1%) menjadi Rp. 9.700 terhadap dolar AS menyusul pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden. Sementara itu, sebagian besar bursa Asia menguat seiring pergantian kepemimpinan di Indonesia.¹ Kekuatan ekonomi di Indonesia Nampak sedikit demi sedikit pulih dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan milik swasta yang tidak lagi menjadi milik pemerintahan. Di dalam memperbaiki perekonomian Indonesia tersebut pemerintah merekapitulasi sistem perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar

¹ *Ibid*, hlm. 325-326.

Rupiah terhadap Dollar AS hingga di bawah Rp. 1.000, serta mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada Triwulan I dan II tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan. Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU Perlindungan Konsumen. Reformasi ekonomi tidak hanya dilakukan dalam lingkup makro tetapi juga dalam lingkup mikro dan sektoral. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama.

Sesuai dengan amanat reformasi yang dititipkan rakyat, pemerintah melalui kebijakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberikan prioritas utama pada penyelesaian undang-undang antimonopoli untuk menghapus pemusatan kekuasaan bisnis pada kelompok tertentu dan menciptakan persaingan yang sehat dan adil. Selain itu, dalam suasana krisis, bidang ekspor berpeluang untuk ditingkatkan. Untuk itu, semua hambatan ekspor disemua sektor, seperti yang pernah ada dalam

pemerintahan Soeharto secepatnya dipangkas dan dihapuskan oleh pemerintah.²

Di era reformasi, pemerintah memberikan perhatian besar pada nasib rakyat. Hal ini terbukti dengan diinstruksikannya Kabinet reformasi Pembangunan yang baru tersusun untuk segera membentuk Tim Ekuin dengan misi utama memulihkan kondisi perekonomian. Program jangka pendek tim ini adalah memulihkan kepercayaan pada mata uang rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada golongan masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis moneter, memprogram padatkarya, penyediaan kebutuhan bahan pokok, dan dukungan untuk usaha kecil dan koperasi. Tim ini bertekad menghapuskan pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa bagi usaha tertentu seperti yang sebelumnya terjadi.³

Dalam upaya mengatasi masalah sembako, Menteri Pangan dan Holtikultura mendirikan Pusat Kajian Krisis Pangan guna memonitor krisis pangan dan mempelajari interaksi krisis pangan dengan krisis lainnya serta mencari jalan pemecahannya. Melalui Menteri Keuangan di era reformasi, berbagai kebijakan dalam kelancaran arus pengadaan pangan diadakan. Untuk itu, dihapuslah segala bentuk pungutan dan

² A. Makmur Makka, *The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan*, Jakarta: Pustaka IIMaN, 2008, hlm. 275.

³ *Ibid*, hlm.273-274.

birokrasi yang menghambat, lebih-lebih terkait dengan pemberdayaan dunia usaha dan penyehatan sistem perbankan.⁴

Rekonstruksi perbankan dilakukan melalui langkah likuidasi bank-bank yang tidak sehat dan rekapitulasi dalam upaya membenahi sistem perbankan. Biaya rekapitulasi perbankan diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Dari proses ini diharapkan akan lahir suatu sistem perbankan nasional yang sehat, andal, dan tangguh, yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan rekapitulasi tersebut diharapkan sektor perbankan bisa menggerakkan sektor riil sebagai salah satu kunci pemulihan ekonomi. Langkah penyehatan sektor perbankan antara lain ditujukan untuk menghindarkan Negara dari kebangkrutan ekonomi.⁵

Berbagai macam keterpurukan memacu rakyat DIY untuk berusaha bangkit walaupun secara kualitas tingkatannya tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. Di samping itu partisipasi rakyat semakin kritis dan terbuka, menuntut adanya suatu perubahan. Rakyat yang mempunyai kedaulatan akan berdaya dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ada perbedaan kedinamisan rakyat suatu daerah dengan daerah lain, tergantung kondisi setempat, atau dapat saja persoalan tersebut hanya dimiliki oleh kalangan atas, karena di kalangan bawah dipandang sebagai barang mewah.

⁴ *Ibid*, hlm. 274.

⁵ *Ibid*, hlm. 322-323.

Suatu hal yang harus diingat bahwa pembangunan sarana dalam upaya peningkatan pendapatan dari atas, pemerintah daerah, belum tentu seketika mendapat tanggapan baik dari masyarakat kecil yang hanya bermodal pas-pasan, misalnya adanya pembangunan, renovasi pasar yang dipandang sebagai sarana pusat perputaran perekonomian daerah. Mereka mengalami keterkejutan mental sebagai pedagang kecil, dan belum siap menghadapi pembaharuan itu, yang mungkin beberapa tahun ke depan, baru dapat dinikmati. Hal yang demikian itu dapat dilihat ketika beberapa pasar Yogyakarta misalnya terban, lempuyangan, kranggan, resonegaran, direnovasi, termasuk Pasar Beringharjo, banyak masalah yang timbul. Ironis sekali bahwa maksud baik pemerintah, dengan selesainya renovasi Pasar Beringharjo pada tahun 1998 yang menempati areal 2.5 ha menjadi 3 lantai itu, bukannya kesejahteraan yang didapat, namun banyak pedagang kecil yang semakin terhimpit, menjerit karena retribusi yang menjerat. Para pedagang kecil tersebut umumnya tidak mampu membayar sewa kapling. Pembagian lokasi yang mereka nilai kurang strategis menyebabkan dagangannya tidak laku, terutama lantai 2 dan 3 yang justru dihuni para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, misalnya pedagang bumbu dapur dan barang-barang bekas. Hanya pedagang besar yang kuat modalnya dapat menempati tempat strategis di lantai dasar.

Keresahan pedagang kecil ini ditangkap oleh DPRD Kota Madya Yogyakarta dan permasalahannya dibawa ke sidang. Walikota Yogyakarta yang masa itu dijabat oleh R. Widagdo, pada awal Desember 1998, dalam

sidang pleno di DPRD Kota Madya, memberi jawaban atas pandangan fraksi, ia mengatakan bahwa lahan kosong di Pasar Beringharjo berdasarkan data bulan September 1998 ada 489 modul. Sampai akhir bulan November 1998 ditempatkan 23 modul, sehingga sisa lahan kosong tinggal 466 modul. Sedangkan sisa lahan tidur di pasar Beringharjo ada 2.000 modul atau 875 pedagang yang secara bertahap akan dilakukan penertiban. Maksudnya agar para pedagang tadi bersedia menempati dan menggunakan lahan dasaran sesuai dengan izin yang telah ditertibkan, dengan melalui penertiban surat pemberitahuan dan surat peringatan. Jika tetap tidak mengindahkan, maka hak penggunaan lahan dasaran mereka akan dicabut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pada awal setelah reformasi lainnya, pemerintah memberdayakan potensi daerah yang dapat digali agar dapat memberi peningkatan taraf hidup masyarakat. Misalnya dibidang pertanian, industri kecil, pariwisata dan usaha-usaha lain. Misalnya Kabupaten Kulonprogo mempunyai pantai wisata selain Congot, juga Bugel. Pantai Bugel tidak terkenal seperti pantai lain, misalnya pantai-pantai yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Ada kerja sama antara Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo dengan desa. Penduduk sekitar Bugel memanfaatkan lahan pantai untuk bertani dengan sistem sumur renteng dan pompa disel untuk mendapatkan air dan ditambah dengan pupuk kandang penyubur tanah, yang lahan pantai tersebut

⁶ SW/Fia/Rsv, "Melongok Pasar yang Direnovasi, Jeritan Pedagang di Lorong Beringharjo", *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 29 Desember 1998, hlm.1.

ditanami kacang, jagung, ketela, tomat dan semangka. Dinas Pertanian Kulonprogo menjadikan hutan buatan sebagai barier atau penahan air laut agar lahan pertanian pantai yang dikembangkan itu akan dapat berproduksi dengan baik dan tanaman tidak diporak-porandakan oleh angin laut. Pada kenyataannya pertanian pantai berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani setempat.⁷

Lain halnya di wilayah Kabupaten Bantul yang masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang beragam, dari petani, wiraswasta, buruh sampai pegawai negeri. Pendapatan asli daerah diperoleh dari beberapa sumber yang antara lain restribusi dari pusat-pusat perdagangan, pasar, tempat usaha dan lain-lainnya, misalnya tempat-tempat wisata, baik wisata pantai maupun tempat-tempat lain yang bersifat rekreatif, kerajinan tangan, pendidikan, kesejarahan maupun spiritual.

B. Dampak di Bidang Politik

Pemerintah mengadakan reformasi dalam bidang politik. Pemerintah berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik dan mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen, kebebasan menyampaikan pendapat akan tetapi berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie

⁷ BS Amisena, "Laporan dari Kulonprogo: Hutan Pantai Bugel Potensial", *Minggu Pagi*, Minggu ke IV, januari 1998, hlm.2.

membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. akan tetapi, salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Langkah dramatis selanjutnya dalam pemerintahan Presiden Habibie yaitu mengadakan sidang Istimewa MPR 1998. Agar pemilu 1998 terlaksana, secara hukum MPR dituntut untuk menggelar sebuah Sidang Istimewa untuk mengubah ketetapan. Tetapi yang berlaku saat itu, yang menyatakan bahwa pemilihan umum berikutnya dilaksanakan pada tahun 2002. Konsekuensinya, sebuah Sidang Istimewa pun dipentaskan pada bulan November 1998. Siding Istimewa ini menghasilkan dua belas Tap

MPR. Tiga dari dua belas Tap itu membentuk embrio reformasi konstitusi yang berlangsung kemudian. Ketiga Tap yang dimaksud adalah:

1. Tap MPR No. VIII Tahun 1998 yaitu tentang pencabutan Tap MPR No. IV Tahun 1983 tentang referendum.
2. Tap MPR No. XIII Tahun 1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Dengan dicabutnya Tap MPR No. IV Tahun 1983 maka kebijakan Orde Baru untuk mencegah terjadinya amandemen UUD 1945 secara resmi dihapuskan. Langkah-langkah kebijakan amandemen kembali menjadi lebih sederhana, karena dikembalikan ke prosedur yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yang menyatakan bahwa dua pertiga anggota MPR harus menghadiri rapat amandemen dan dua pertiga dari yang hadir itu menyetujui usulan amandemen. Tap MPR No. XIII mengubah interpretasi Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 1 dalam Tap ini menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan.

Aturan tersebut menghapus interpretasi sebelumnya bahwa seorang Presiden bisa dipilih lagi untuk lebih dari dua periode, sebuah interpretasi yang dengan sangat efektif dimanfaatkan oleh Soeharto, sehingga ia bisa

dipilih lagi dan lagi hingga enam kali. Aturan ini kemudian diadopsi sebagai perubahan pertama Pasal 7 UUD 1945. Selanjutnya Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah landasan hukum bagi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagian besar pasal ini kemudian diadopsi ke perubahan kedua UUD 1945, yang diberlakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000.⁸

Persiapan Pemilu tahun 1999 berlanjut dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru yang mengatur pemilu, partai politik dan susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sayangnya, DPR yang bertanggung jawab mengkaji semua undang-undang itu melakukan sebagian besar proses legislasi di ruang-ruang tertutup. Rapat-rapat dengar pendapat dengan masyarakat dilakukan sekedar untuk basa-basi. Kompromi-kompromi politik jangka pendek itu pun mempengaruhi pembahasan-pembahasan itu dan melahirkan sejumlah cacat dan kekurangan dalam undang-undang baru yang mengatur tentang pemilu. Salah satu diantara kelemahan yang signifikan adalah fakta tentang undang-undang baru tentang komposisi parlemen mengatur bahwa TNI-POLRI dihadiahi jatah 38 kursi gratis dari 500 jumlah kursi di DPR. Kendati jumlah kursi gratis ini sudah berkurang dari jumlah sebelumnya 75 kursi. Relevansi semacam

⁸ H. Soeharto, *Tumbangnya Rezim Soeharto*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, hlm. 170-171.

itu jelas-jelas tidak demokratis. Aturan demikian kembali melenggangkan penerapan dwifungsi militer yang anti demokrasi.⁹

Pada masa pemerintahan Habibie yaitu mengatasi masalah dwifungsi ABRI. ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari dunia politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan Negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintah untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya di tiadakan. Kemudian Pemisahan Kesatuan Polisi dari Angkatan Bersenjata merupakan langkah B.J Habibie dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Sekalipun menuai banyak kritik, undang-undang Pemilu memberikan landasan yang memadai bagi terselenggaranya Pemilu tahun 1999. Salah satu langkah reformatif adalah diberlakukannya sistem multi partai berdasarkan undang-undang partai politik, menggantikan sistem satu partai ala Orde Baru yang otoriter. Kemeriahan politik pasca Soeharto antara lain melahirkan 141 partai politik, yang 48 diantaranya memenuhi syarat untuk ikut bertarung dalam ajang Pemilu 1999. Belakangan, sistem multi partai ini ikut berperan kuat dalam menghasilkan perdebatan akan

⁹ *Ibid*, hlm. 171-172.

kaya pemikiran dan lebih terbuka sebelum keempat perubahan UUD 1945 disahkan.¹⁰

Di Yogyakarta pada tahun 1980-an, terdapat fenomena baru, yaitu tumbuh suburnya gerakan intelektual di kampus-kampus dalam bentuk kelompok diskusi dan hadirnya paham keagamaan baru, terutama di kalangan Muslim di luar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Gerakan keagamaan baru yang marak adalah gerakan tarbiyah¹¹ yang dipengaruhi oleh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al Bana dan gerakan Salafi¹² yang dipengaruhi oleh paham Wahabi di Saudi Arabia. Sebagian pengikut kelompok ini adalah mahasiswa dan pemuda yang sedang menempuh kuliah di Yogyakarta. Basis gerakan mereka di masjid-masjid kampus atau masjid sekitar kampus, seperti masjid Mardiyah di dekat R.S Sardjito, masjid Mujahiddin di Universitas Negeri

¹⁰ *Ibid*, hlm. 172.

¹¹ *Tarbiyah* secara etimologi bermakna pendidikan, pengajaran, dan pembinaan. Gerakan ini disebut sebagai Tarbiyah karena menekankan pembinaan anggotanya melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai media pertemuan. Sebelum reformasi, kelompok-kelompok ini tersembunyi untuk menghindari kekerasan politik Orde Baru.

¹² *Salafi* secara etimologi berarti pengikut orang-orang terdahulu. Di Indonesia, Salafi mengandung dua makna, pertama merujuk pada sekolah atau pesantren tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama. Dikalangan Nahdlatul Ulama, pesantren salafi berarti pesantren yang khusus mengkaji dan mengajarkan Kitab Kuning warisan ulama klasik. Kedua, merujuk pada kelompok Wahabi, yaitu mereka yang menyerukan umat Islam kembali kepada Al Qur'an dan Hadist sebagaimana dipahami oleh rosul, para sahabat, dan ulama terdahulu yang saleh.

Yogyakarta yang sejak tahun 1990-an menjadi salah satu pusat gerakan tarbiyah di Yogyakarta.¹³

Dua gerakan ini memiliki orientasi yang berbeda. Gerakan tarbiyah mempunyai orientasi politik paktis yang tidak dimiliki oleh pengikut gerakan salafi. Oleh karena itu, pasca reformasi, para pengikut gerakan ini melakukan transformasi politik dengan membentuk Partai Keadilan yang belakangan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Orientasi politik dan sosial yang lebih jelas yang diusung oleh gerakan tarbiyah dan juga faktor pelebagaan mereka dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menjadikan gerakan ini mendapat pengikut yang luas. Melalui LDK ini pula paham tarbiyah kemudian diperkenalkan pada saat rekrutmen mahasiswa baru.¹⁴

Salah satu institusi yang berperan penting bagi perkembangan gerakan salafi dan tarbiyah di Indonesia, khususnya di Yogyakarta adalah DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang dibentuk oleh mantan perdana menteri M. Natsir pada tahun 1967. Melalui DDII inilah banyak pemimpin awal tarbiyah dan salafi mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Selain itu, DDII juga menjadi kontak utama bagi penyaluran dana dari lembaga donor dan Timur Tengah di Indonesia. Dari sinilah kemudian DDII mampu membangun masjid, pusat gerakan

¹³ Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 69-70.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 70.

dakwah, mengirim da'i ke daerah terpencil, dan menerjemahkan buku-buku Islam yang kemudian disebarakan ke seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensor yang ketat untuk membatasi kebebasan pers. Menteri Penerangan kala itu mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 01 Tahun 1984 tentang izin penerbitan. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Menteri Penerangan untuk mencabut SIUPP atau lisensi penerbitan milik perusahaan media mana pun yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Pada bulan Juni pemerintahan Habibie mencabut peraturan ini dan menyederhanakan prosedur pemberian surat izin bagi dunia penerbitan. Kebijakan ini melahirkan ratusan penerbitan baru dan era baru dalam kebebasan pers.

Selain itu, masyarakat juga menikmati kebebasan baru dalam berekspresi. Mereka bisa dengan bebas dan aktif mendiskusikan isu-isu kritis termasuk bahasan mereformasi UUD 1945. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ini mempengaruhi reformasi-reformasi konstitusi yang dihasilkan pada rentang waktu 1999-2002. Tanpa ada pembatasan dan larangan, media berhak meliput berbagai diskusi tentang konstitusi. Kalangan dan aktivis organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan bebas mengkritisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses dan hasil-hasil perubahan yang dilakukan oleh parlemen.¹⁵

Di bawah pemerintahan rezim Soeharto, setiap pimpinan oposisi harus siap jika sewaktu-waktu dijebloskan ke dalam penjara, menjadi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 172-173.

tahanan politik (tapol). Menjelang tumbangnya Soeharto, terdapat lebih dari 200 tapol, mulai dari pemimpin mahasiswa, aktivis muslim, orang Timor Timur, dan kader Komunis berusia lanjut, yang bahkan diantaranya sudah mendekam dipenjara lebih dari 25 tahun. Setelah jatuhnya rezim Soeharto, tekanan-tekanan internasional maupun domestik untuk membebaskan semua tahanan ini semakin menguat. Menanggapi tekanan demikian, Habibie memerintahkan 179 tapol, yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Timor Timur untuk dibebaskan. Muladi, Menteri Kehakiman dalam kabinet Habibie, mengakui bahwa kebijakan itu merupakan suatu upaya pemerintah untuk mendongkrak citranya di bidang hak-hak asasi manusia. Apapun tujuannya, pembebasan tapol ini adalah salah satu proses yang menghilangkan praktik otoritarianisme yang umum terjadi dalam rezim Soeharto. Lagi pula tindakan demikian memperkuat iklim politik yang lebih terbuka yang dibutuhkan untuk membahas isu-isu penting seperti reformasi konstitusi.¹⁶

Presiden B. J Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik dan narapidana politik yang dipenjarakan karena menentang pemerintah pada masa kepresidenan Soeharto. Diantara mereka yang dibebaskan adalah Dr. Sri Bintang Pamungkas, Ketua PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia), dan Dr. Mochtar Pakpahan, Ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Presiden B. J Habibie tidak sepakat penahanan terhadap sejumlah tokoh politik disebabkan perbedaan sikap politik mereka

¹⁶ *Ibid*, hlm. 173.

terhadap penguasa. Jelas karena alasan yang digunakan hanya berdasarkan penilaian penguasa masa lalu terhadap mereka yang dipandang bersikap kritis terhadap Presiden Soeharto, maka menurut B.J. Habibie mereka tidak sepatutnya ditahan.¹⁷

Pemilihan untuk mementaskan pemilu 1999 ini merupakan keputusan penting periode pra-amandemen Indonesia. Dengan melaksanakan pemilihan umum secepat mungkin setelah lengsernya Soeharto, Indonesia memulai transisinya dari kekuasaan otoriter sebagaimana mestinya.¹⁸ Hal tersebut juga menjadi tuntutan para mahasiswa yang akhir-akhir lalu melakukan berbagai aksi dan demonstrasi. Dengan bergulirnya pemilihan umum, kegiatan politik di Indonesia menjadi lebih demokratis.

Setelah pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR, MPR dan DPRD selesai digelar pada tanggal 7 Juni 1999, para pengamat internasional maupun domestik menyatakan bahwa meski pemilu tersebut menghasilkan sesuatu namun terdapat juga sedikit kekurangan dalam bebas, jujur dan adil. Namun demikian, hal tersebut merupakan hasil yang sangat penting dibandingkan dengan hasil-hasil pemilu yang diselenggarakan dalam pemerintahan Soeharto.

Hingga tanggal 8 Agustus 1998 Perumusan Tata Tertib Penetapan Gubernur Kepala Daerah DIY menemui jalan buntu menyusul pengajuan

¹⁷ A. Makmur Makka, *op. cit.* hlm. 270.

¹⁸ H. Soeharto, *op. cit.*, hlm. 174.

nama Alfian Darmawan oleh FPP sebagai bakal calon. Sementara FKP dan FPDI mengajukan bakal calon Sri Sultan HB X. jalan buntu itu disebabkan FPP berpegang pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Kepala Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pimpinan Dewan (DPRD), pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sebaliknya FKP, FABRI, dan FPDI berpegang pada keistimewaan Yogyakarta yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundang-undangkan oleh RI tanggal 4 Maret 1950. Arti keistimewaan seperti dirumuskan oleh Pasal 18 UU No. 2 Tahun 1948 sebagai UU umumnya berbunyi: Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dan keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat daerah itu. Dengan demikian dalam pemilihan Gubernur kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut seharusnya DPRD tinggal meneliti Sri Sultan HB X (keturunan keluarga kerajaan), apakah memenuhi syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat daerah itu.¹⁹

Kecintaan rakyat Yogyakarta terhadap rajanya, tidaklah main-main. Dalam sidang rakyat di gedung DPRD DIY pada 26 Agustus 1998

¹⁹ PJ. Soewarno, *Sengketa Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: Bernas, Selasa, 11 Agustus 1998, hlm. 1.

itu, mereka mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi kepala daerah. Mereka mengatakan, tidak ada yang berhak menduduki kursi Gubernur DIY kecuali Sri Sultan Hamengku Buwono X. peristiwa ini mengingatkan kembali dalam pisowanan ageng yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1998, sehari sebelum Soeharto menyatakan dirinya mundur sebagai presiden Republik Indonesia. Pisowanan kali ini membuat sejarah baru. Yakni, pengukuhan penguasa Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sidang rakyat.²⁰

Permintaan DPRD Tingkat I DIY agar Sri Sultan Hamengkubuwono X agar dilantik karena semua wakil rakyat sudah menetapkannya sebagai calon tunggal, ternyata ditolak sekjen Depdagri H. Faisal Tamin dengan dialih mekanisme pemilihan Gubernur DIY harus sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974. Sekjen Depdagri menegaskan hal itu ketika menerima rombongan wakil rakyat DIY yang dipimpin Ketua DPRD Subagio Waryadi di Depdagri Jakarta, Selasa 28 Agustus 1998. Subagio didampingi antara lain Marfuah, Khairuddin, Sudarno, H. Hudoro, H. Ginto Bagianto, Surachmanadi, H. M Fakhil, Herman Abdurrahman, H. M Chamdani, Munawir, H. Soegiantoro, Sudomo Sunaryo (Asisten I Sekwilda), Soebekti Soenarto (PLH Sekwilda DIY). Kepala wakil rakyat DIY tersebut Faisal Tamin meminta agar masyarakat DIY memikirkan segala sesuatu mengenai proses pencalonan Gubernur

²⁰ Arwan Tuti Artha, *Langkah Raja Jawa Menuju Istana: Laku Spiritual Sultan*, Yogyakarta: Galangpress, 2009, hlm. 70.

Kepala Daerah Tingkat I DIY tetap dalam kerangka kepentingan nasional. Kalau DIY memaksakan kehendak untuk menghiraukan UU No. 5 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua daerah Indonesia, dikhawatirkan daerah lainnya juga melakukan tuntutan serupa. Katanya, UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sama sekali tidak menyinggung soal-soal keistimewaan Yogyakarta. Yang menjelaskan soal keistimewaan pembentukan DIY terdapat dalam UU No.3 Tahun 1950. Pemilihan seorang Gubernur untuk DIY sama sekali tidak dijelaskan dalam UU No.3 tahun 1950 tersebut. Undang-undang tersebut hanya mengatur pembentukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, bukan soal pemilihan seorang Gubernur. Menanggapi permintaan agar kasus ini bias berlaku hanya di Yogyakarta, Faisal Tamin mengatakan Indonesia ini besar dan bukan hanya ada Yogyakarta atau dua daerah lainnya. Dia juga khawatir kalau Yogyakarta meminta tidak menggunakan UU No.5 Tahun 1974, malah akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya.

Faisal Tamin lantas meminta maaf akan kata-katanya, maksudnya hanya ingin mengingatkan bahwa Indonesia Negara kesatuan yang pemerintahannya dilakukan secara nasional. Beliau juga mengatakan bahwa kalau Yogyakarta bisa lepas dari UU No. 5 Tahun 1974 besok atau lusa akan diikuti oleh Sultan-sultan lainnya. Mereka juga memiliki andil besar bagi kemerdekaannya bangsa ini. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa meskipun menggunakan UU No. 5 Tahun 1974, Sri Sultan Hamengku Buwono X dipastikan akan menduduki jabatan Gubernur DIY.

Masyarakat Yogyakarta tidak perlu khawatir karakteristik keistimewaan Yogyakarta akan hilang hanya karena proses pemilihan Sri Sultan menggunakan UU No. 5 Tahun 1974.

Rombongan wakil rakyat kembali ke Yogyakarta dengan hasil yang tidak memuaskan, dimana sesuai permintaan Sekjen Depdagri agar pemilihan Gubernur DIY dikembalikan ke proses pemilihan awal. Padahal maksud kedatangan mereka ke Jakarta adalah menyerahkan surat kesepakatan dan keputusan pimpinan serta persyaratan administrasi calon Gubernur DIY dan meminta kepada Presiden melalui Mendagri agar calon tersebut ditetapkan atau dikukuhkan.²¹

Sabtu, Legi 11 Jumadilakhir 1931 (3 Oktober 1998) sejarah mencatat peristiwa penting “pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur DIY”. Dilihat dari segi perjuangan reformasi yang menghendaki pemerintahan demokratis, Sultan Hamengku Buwono X adalah gubernur pertama yang pemunculan dan dukungannya paling menonjol. Dipandang dari sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan tokoh ketiga yang memegang pemerintahan DIY setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diteruskan Sri Paku Alam VIII sebagai pejabat Gubernur.

Dukungan rakyat kecil sejak beberapa tahun silam merupakan penyangga pilar perjuangan rakyat setempat dan juga merupakan potensi dasar sebagai kekuatan dan ketaatan suci dari rakyat yang bersatu.

²¹ Depdagri tolak Usul DPRD DIY, *Harian Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, Rabu, 26 Agustus 1998.

Sementara itu dalam pernyataannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X bertekad akan melestarikan spirit reformasi di berbagai bidang kehidupan seperti yang telah dilontarkannya sejak dua tahun terakhir. Sesuai pula dengan yang diucapkannya dalam pidato 20 Mei 1998 dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta yang intinya akan mengarahkan segala daya demi kesejahteraan rakyatnya. Acara yang berlangsung di Bangsal Kepatihan pukul 10.00 pagi tersebut, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden B. J Habibie melantik dan mengambil sumpah Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa bakti 1998-2003.²²

Menurut penjelasan Selo Soemardjan, sesungguhnya pemerintah pusat tidak menganggap perlu menghormati kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, terutama setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII wafat. Maunya Yogyakarta dianggap sebagai provinsi biasa, gubernurnya diangkat dari tiga calon partai politik melalui DPRD. Pada waktu itu, partai politik hanya ada tiga, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Padahal, lowongan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang berstatus istimewa menurut hukum harus diisi seorang calon dari keluarga Sultan.²³

²² Sultan Hamengku Buwono X Kekuatan Populisnya, *Harian Bernas*, Yogyakarta, Sabtu, 3 Oktober 1998.

²³ Arwan Tuti Artha, *op. cit.*, hlm. 70-71.

Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, kedudukan gubernur baginya akan digunakan sebagai alat legitimasi untuk meningkatkan kemampuan mengabdikan kepada masyarakat. Menurut Sultan, yang paling penting adalah mengubah pola pikir aparat birokrasi agar dalam membuat program, keberpihakan kepada rakyat semakin besar. Sultan menegaskan lagi, bahwa bila saatnya tiba bagi kerabat Keraton dan kerabat Pakualam mempunyai peluang untuk mengisi jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, maka proses demokrasi harus berlaku bagi mereka. Pernyataan Sultan ini merupakan sejarah yang tidak tertulis mengenai eksistensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴

C. Bidang sosial dan budaya

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, ketika menghadapi para pengunjung rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Pelaku unjuk rasa yang di tindak

²⁴ *Ibid*, hlm. 73.

dengan pasal yang berbeda-beda dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. adalah UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adanya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Namun sayangnya, undang-undang itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dijamin tentang kebebasan pers yaitu kebebasan meliput berita yang sedang marak terjadi sekalipun melibatkan pejabat pemerintah.

Disamping itu pula, selaras dengan berjalannya roda reformasi, pemerintah mencabut ketentuan pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha penerbitan Pers), seperti tercantum pada Permenpen No. 01 tahun 1984, yang selama ini menghantui wartawan dan telah membatasi banyak majalah dan surat kabar di Indonesia. Pencabutan ini diterapkan dengan permenpen No. 01 tahun 1998. Dengan ketetapan Menteri Penerangan yang baru tersebut, majalah dan tabloid yang pernah dibatasi bisa mengajukan SIUPP kembali. Sampai pada bulan Juni 1999, oleh pemerintah telah dikeluarkan tidak kurang dari 400 SIUPP. Kini yang paling dramatis, yang telah

membuat kehidupan pers di Indonesia mungkin adalah yang paling bebas di seluruh dunia.²⁵

Sementara itu akibat dari perjuangan para mahasiswa menegakan tonggak reformasi di Indonesia menuai keberhasilan yang sangat bagus dalam dunia sosial dan budaya di Indonesia. Dalam pemerintahan reformasi yang demokratis ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada media massa untuk secara objektif dan berimbang melakukan kritik terhadap pemerintah. Bahkan karena kesadarannya terhadap peran sentral pers dalam pembangunan, pemerintahan reformasi menentang segala tindakan penguasa yang membatasi kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi.

Namun perlu disadari, kemerdekaan dengan sendirinya membawa tanggung jawab, bukan hanya kepada pemerintah tetapi kepada masyarakat, bangsa dan negara, juga kepada hati nurani dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemerintah mengingatkan kepada kalangan pers agar mampu menarik garis tegas antara informasi dan agitasi serta propaganda. Kebebasan pers tidaklah berarti kebebasan menyiarkan berita rumor yang tidak jelas sumber beritanya, apalagi dusta dan fitnah yang dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan masyarakat. berkaitan dengan hal tersebut maka dikeluarkanlah UU. No. 09 tahun 1999 mengenai kebebasan

²⁵ A. Makmur Makka, *op. cit.* hlm. 276-277.

mengemukakan pendapat yang berarti pers dapat bebas kembali sebagai kontrol sosial.²⁶

Pemerintah reformasi juga menetapkan para mahasiswa yang meninggal dalam perjuangan menggapai reformasi dan menjadi korban dalam unjuk rasa di Universitas Trisakti sebagai pahlawan reformasi. Dalam hal ini pemerintah di bawah Presiden B.J. Habibie tidak main-main, beliau meminta Civitas Academica Universitas Trisakti untuk mengajukan usulan pengangkatan mereka sebagai Pahlawan Reformasi melalui Sekretariat Negara, agar bisa diurus sesuai dengan tata cara kenegaraan. Presiden B.J. Habibie juga menyetujui pengadilan terhadap pelaku penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti. Sebanyak 17 perwira, bintara dan tamtama diduga terlibat dalam penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti tersebut. Hal ini terungkap dari hasil kerja tim penyelidikan yang dibentuk oleh Menhankam/Pangab.²⁷

Terdorong oleh perasaan prihatin yang mendalam atas terjadinya huru-hara tanggal 13-14 Mei 1998 dengan segala akibatnya pemerintah reformasi meninjau lokasi-lokasi bekas kerusuhan dan korban serta kerugian yang ditimbulkan di ibukota. Peninjauan ini dimaksudkan untuk mendengar langsung permasalahan dari rakyat yang telah mengalami kerugian akibat kerusuhan tersebut. Masalah kerusuhan yang telah menelan banyak korban dan kerugian itu sangat meminta perhatian

²⁶ *Ibid*, hlm. 277-278.

²⁷ *Ibid*, hlm. 278-279.

pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah segera menginstruksikan kepada jajaran ABRI agar segera mengungkapkan kasus kerusuhan dan sinyalmen yang mengatakan adanya kelompok yang terorganisasi yang menjadi dalang kerusuhan di Jakarta dan Solo 13-14 Mei 1998.²⁸

Namun disamping berbagai dampak positif akibat peranan mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi, terdapat juga dampak negatif atau kekurangannya. Akibat semangat perjuangan yang menggebu-gebu dari para mahasiswa yang lantang meneriakkan tuntutan reformasi, kekerasan telah menjadi budaya populer pada saat itu. Gerakan-gerakan separatisme mulai bermunculan. Rakyat lebih peduli pada sentiment-sentimen separatisme, seperti yang terjadi di Aceh, Timor Timur dan Irian Jaya. Hukum sudah tidak lagi dihormati, dan kredibilitas Tentara Nasional Indonesia pun semakin merosot.²⁹ Kekerasan nampaknya telah menjadi suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kemelut aksi yang berkejolak pada saat itu yang mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan dengan menelan korban jiwa, harta dan kerugian mengatas namakan kebebasan dan reformasi. Suatu hal yang perlu disayangkan oleh banyak pihak, jika suatu kebebasan dalam berdemokrasi harus ditumpangi oleh kekerasan. Aksi kekerasan terus terjadi di tahun 1999.

Dipenghujung tahun 1990 merupakan masa perubahan dengan skala besar di Indonesia. Setelah terjadi protes besar-besaran, rezim Orde

²⁸ *Ibid*, hlm.282.

²⁹ *Ibid*, hlm. 243.

Baru Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun, runtuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa gejolak dan keterungkungan masyarakat untuk mengekspresikan dirinya dan mengubah sesuatu selama Orde Baru merupakan faktor penting dalam perkembangan taman bacaan. Selama Orde Baru, berbagai organisasi, seperti organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan sekalipun, ditekan dan dibatasi ruang geraknya. Selain untuk memperoleh kebebasan, mereka juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat akibat dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, yang menyebabkan anak putus sekolah, bahkan menjadi anak jalanan. Inilah yang menjadi faktor penggerak munculnya organisasi sosial dari latar belakang komunitas yang berbeda untuk bekerjasama dan menyediakan layanan-layanan sosial. Hal inilah pula yang menggerakkan mereka untuk memfokuskan diri pada layanan sosial di bidang pendidikan dan kebebasan untuk mengakses informasi, sejak salah satu ciri Orde Baru adalah seluruh informasi dikontrol dan masyarakat dibatasi untuk mengekspresikan diri.³⁰

Lengsernya Soeharto dan terbukanya kran reformasi di Indonesia membuka jalan yang lebih dinamis bagi masyarakat sipil di Indonesia. Ini merupakan sesuatu hal yang penting, tetapi tidak bisa dijadikan satu-

³⁰ Stian Haklev, *Mencerdaskan Bangsa Suatu Pertanyaan Fenomena Taman Bacaan di Indonesia*, 2008, Advanced Seminar In international Development Studies IDSY01Y, hlm. 21.

satunya sebab bagi meluasnya perkembangan taman bacaan independen.³¹ Setelah reformasi, di Yogyakarta, LSM memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, budaya, dan seni. Mereka mempromosikan ide mengakses ke perpustakaan dan informasi sebagai pelayanan pemerintah yang penting. Hal ini membuat komunitas semakin yakin akan pentingnya membaca, akses informasi dan ketersediaan informasi untuk komunitas tersebut.³²

Berbagai aksi sosial lintas agama seperti Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY) yang dibentuk oleh beberapa tokoh agama di Yogyakarta ikut mewarnai dunia sosial dan budaya pasca reformasi. KKY dibentuk guna merespon masalah-masalah kemanusiaan yang timbul di Yogyakarta. Segenap LSM di Yogyakarta pun ikut mendirikan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) yang dibentuk akibat kecemasan dan keresahan akan berbagai aksi kekerasan dan kerusuhan yang mengatasnamakan SARA yang banyak terjadi di daerah-daerah Indonesia sekitar tahun 1996 sampai dengan awal reformasi. Berbagai kerusuhan dan konflik yang bernuansa SARA tersebut banyak mengundang keprihatinan dari berbagai kelompok pemuda dan para tokoh lintas agama di Yogyakarta. Orang-orang yang mempunyai keresahan dan keprihatinan yang sama ini kemudian berkumpul untuk berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai antisipasi supaya kerusuhan yang terjadi di luar jangsan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 24.

sampai masuk ke Yogyakarta dengan mengurai akar permasalahan yang menjadikan kerusuhan berbau SARA itu. Mereka bertukar pikiran mengenai kemungkinan antisipasi-antisipasi ke depan dalam menghadapi masalah-masalah, baik yang ditemui sebagai penyebab terjadinya kerusuhan maupun akibat dari kerusuhan-kerusuhan semacam itu, dalam hubungan kehidupan agama-agama di Indonesia.³³

Sejak kelahirannya sampai sekarang, Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) semakin meneguhkan diri sebagai sebuah gerakan lintas iman yang bukan hanya berfokus pada persoalan-persoalan hubungan antar agama, namun juga pada perjuangan dan komitmen sosial. Hal ini terlihat ketika FPUB merespon kondisi krisis moneter yang terjadi di tahun 1997 dengan memberikan bantuan sembako dan pakaian pantas pakai guna meringankan beban berat rakyat miskin di Yogyakarta. Sasaran daerah distribusi bantuan antara lain di daerah pinggiran Code, pinggiran masyarakat Kali Winongo, Tepus, Sitimulyo, Walik Angin dan Kali Kuning. Mereka membagikan bantuan itu secara bersama-sama dengan perwakilan seluruh tokoh lintas agama yang ada di Yogyakarta.³⁴ Berbagai aksi dan forum serupa pun mulai bermunculan di Yogyakarta, seperti Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY) yang ikut bahu-membahu bersama-sama merespon dan meringankan beban rakyat Yogyakarta akibat krisis dan reformasi.

³³ *Ibid*, hlm. 78.

³⁴ *Ibid*, hlm. 83-84.

Disisi lain, sebanyak 13 perwakilan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Selasa siang, 29 Mei 2012, mendatangi Gedung Pracimosono Keraton Yogyakarta untuk menyatakan dukungan mereka terhadap status Keistimewaan Yogyakarta. Dukungan para perwakilan paguyuban Tionghoa Yogyakarta itu diwujudkan dengan penyampaian piagam bernama Ikrar '1940-2012' yang intinya berisi sikap setia warga Tionghoa kepada pihak Keraton. Penerima ikrar itu dari pihak keraton Yogyakarta adalah KGPH Hadiwinata. Beberapa di antara paguyuban masyarakat Tionghoa tersebut adalah Yayasan Bhakti Loka, Paguyuban Hakka, Perhimpunan Fu Qing, Hin An Hwee Koan, dan lain lain. Sedangkan jumlah masyarakat Tionghoa di Yogyakarta mencapai 20 ribu orang, yang mayoritas menetap di sekitar Malioboro.

Sesepuh Perwakilan Paguyuban Tionghoa Yogya, Soekeno, menyatakan ikrar kesetiaan mereka untuk mendukung Keistimewaan Yogya merupakan bentuk terima kasih masyarakat Tionghoa kepada keraton Yogyakarta. Selama ini warga Tionghoa sudah merasa sangat diayomi dan dilindungi pihak Keraton Yogyakarta tanpa dibeda-bedakan. Warga Tionghoa pun perlu ikut berjuang untuk keistimewaan Yogya seterusnya di bawah Keraton dan Paku Alam. Soekeno pun mencontohkan peran Keraton dan Paku Alam secara konkret dalam kejadian reformasi 1998. Meski saat itu warga Tionghoa banyak yang menjadi korban dan penjarahan dan amuk massa di berbagai daerah seperti Jakarta dan Solo, saat itu Hamengku Buwono X secara nyata melindungi warga Tionghoa di

Yogya. Menurut Soekeno, selama 14 tahun pasca reformasi, pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan apa pun atas upaya HB X. Soekeno mengatakan sebenarnya masyarakat Tionghoa Yogyakarta merasa malu karena baru bisa memberikan ikrar saja saat ini..

Melalui ikrar itu, lanjutnya, pihaknya secara tegas menyatakan sepenuhnya mendukung keistimewaan DI Yogyakarta yang kini tengah digodok dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) di DPR RI. Perwakilan masyarakat Tionghoa Yogyakarta lain, Antonius Simon menuturkan ikrar masyarakat Tionghoa ini pun sebenarnya menjadi momen untuk mengingat sejarah kala 1940 leluhur mereka juga pernah menyatakan ikrar setia kepada keraton Yogya yang kala itu dipimpin HB VIII. Mewakili Keraton Yogyakarta, KGPH Hadiwinata berterima kasih atas dukungan itu. Masyarakat Tionghoa sama dengan masyarakat lain di Yogya. Tetap warga Yogya, tak ada perbedaan. Hadi menuturkan keberadaan masyarakat Tionghoa di Yogya pun telah banyak berperan dalam perputaran roda ekonomi di provinsi DIY.³⁵

D. Dampak di Bidang Pendidikan

Krisis moneter ternyata telah menimbulkan dampak yang begitu menyedihkan bagi kebanyakan masyarakat sehingga banyak orang tua tidak dapat lagi membiayai pendidikan anaknya. Tidak sedikit siswa dan

³⁵ Masyarakat Tionghoa Dukung Keistimewaan Yogya. Tersedia pada <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/30/058407039/Masyarakat-Tionghoa-Dukung-Keistimewaan-Yogya>. Diakses pada tanggal, 20 Juli 2012.

mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan program pendidikannya. Di wilayah DIY seperti, Kabupaten Kulonprogo yang menurut sensus tahun 1997 berpenduduk 586.27 jiwa mencakup 12 kecamatan dan 88 desa, di salah satu desanya pernah terkena penyakit demam berdarah dan malaria bahkan didapati adanya anak-anak putus sekolah. Daerah yang dimaksud letaknya di perbatasan DIY-Jawa Tengah, yaitu Dusun Plampang, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Dusun ini ada 3, yaitu Plampang I berpenduduk 198 jiwa, Plampang II 143 jiwa dan Plampang III 153 jiwa. Masyarakat di dusun tersebut pernah terkena malaria setelah sebelumnya terkena demam berdarah.³⁶

Di Plampang, daerah perbatasan itu hanya ada 1 TK dan 1 SD Gunung Ijo yang dikelola oleh yayasan Bopkri. Walaupun sekolah sangat sederhana, namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pada umumnya para siswa di sini hanya menamatkan SD saja, karena letak SLTP yang jauh. Seperti yang dikemukakan oleh Drs. Giran Riyanto, Kepala Sekolah SD Bopkri Gunung Ijo, pada akhir tahun ajaran 1997/1998 sekolah ini meluluskan 12 siswa dan yang melanjutkan ke SLTP hanya 7 siswa dan lainnya tidak melanjutkan karena tidak mampu. Melalui musyawarah sekolah dan Komisi Pemuda GKJ Ngulakan, ada kesepakatan bahwa pihak sekolah berusaha membantu meringankan beban masyarakat. Misalnya bagi keluarga yang kurang mampu bersama Komisi Pemuda

³⁶ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah* (Studi Kasus Di DIY 1945- Awal reformasi), 2003, hlm. 131.

GKJ Ngulakan mengadakan pembagian sembako, bagi siswa kurang mampu dan bagi siswa berprestasi, sekolah mencari beasiswa.³⁷

Untuk menyelamatkan dunia pendidikan nasional, pemerintah melalui program reformasi mulai tahun 1999 membebaskan biaya sekolah untuk Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Tahap Akhir (SMTA). Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa untuk SD kepada 1.16 juta siswa dan 1.56 juta siswa SLTP. Untuk siswa SMTA dan perguruan tinggi jumlahnya akan ditentukan kemudian. Disamping itu pula, pemerintah juga memberikan dana untuk biaya operasional untuk SD sebanyak 69.300 buah, untuk SLTP sebanyak 12.200 buah, untuk SMTA dan Perguruan Tinggi akan ditentukan kemudian. Pemerintah juga menyediakan buku-buku pelajaran sekolah.³⁸

Mengenai normalisasi kehidupan kampus, kebijakan yang pernah diberlakukan dalam pemerintahan rezim Orde Baru ditinjau kembali dan bahkan aturan-aturan yang menghambat kreatifitas mahasiswa dan kebebasan kampus dicabut oleh pemerintahan pusat. Lembaga ilmiah seperti kampus perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Kebijakan pemerintahan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada, Universitas 11 Maret, dan IKIP

³⁷ Keterangan Suyitno, Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap Kulon Progo Dalam; "Desa Yang Sarat Anak DO", *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 25 Juli 1998, hlm. 8.

³⁸ *Ibid*, hlm. 275-276.

Jakarta. Sementara itu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung mengadakan kunjungan ke Bina Graha dan di terima oleh Presiden B.J. Habibie. Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia bahwa seorang Presiden menerima dan terlibat langsung dalam dialog dengan para mahasiswa di tempat kerjanya. Kesempatan pertama ini dimanfaatkan oleh para mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung yang datang untuk menyampaikan masukan pemikiran pembangunan bangsa di era reformasi.³⁹ Di era reformasi ini, perjuangan para mahasiswa nampaknya telah membuat suatu perubahan yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia.

Pada masa setelah reformasi, antara tahun 1997-1998 merupakan masa transisi dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menuju desentralisasi. Pada tahun 2000 sampai saat ini, sistem pemerintahan yang ada adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Perencanaan pembangunan pun dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan Rencana kerja pemerintahan. Pada saat ini perencanaan pembangunan, khususnya bidang pendidikan disesuaikan dengan otonomi daerah masing-masing, tetapi tetap dalam komando pemerintah pusat. Komando dari pemerintah pusat seperti kurikulum pendidikan, standarisasi nilai, dan lain-lain. Berdasarkan

³⁹ *Ibid*, hlm. 276.

RPJMN tahun 2004-2009 perencanaan pembangunan pasca reformasi dibagi menjadi sepuluh program. Kesepuluh program yaitu :

1. Program Pendidikan untuk Anak Usia Dini

Program ini sudah banyak bermunculan, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Siswa program ini adalah anak sebelum masuk usia TK (2-4tahun) dan usia TK (4-6 tahun). Program ini ditujukan untuk mempersiapkan anak sebelum memasuki sekolah. Pada program PAUD ini anak-anak mendapatkan pelajaran bernyanyi, belajar membaca, mewarnai, dan mengenal angka. Adapun kegiatan pokok yang dilakukan pemerintah adalah:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Pengembangan kurikulum yang mengacu pada perkembangan anak, ilmu pengetahuan dan sosial budaya.
- c. Upaya sosialisasi kepada masyarakatan pentingnya program PAUD.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan guna peningkatan kualitas PAUD.

2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program ini merupakan kelanjutan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah pada masa orde baru. Program ini meliputi wajib belajar pada tingkatan SD, SMP dan sederajatnya. Program ini lebih menitik beratkan pada:

- a. Peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar melalui paket A yang setara dengan SD, MI, dan sederajatnya serta paket B yang setara dengan tingkat pendidikan SMP, MTs, dan tingkat pendidikan lain yang sederajat.
- b. Mempertahankan kinerja yang diperoleh dalam rangka penurunan angka buta huruf dan angka tidak naik kelas.
- c. Adanya penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Program Pendidikan Menengah

Program kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu dan peningkatan pelayanan akses pada tingkat pendidikan menengah. Program ini dilakukan pada tingkat pendidikan SMA, SMK, MA, dan kejar paket C. Program ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap dampak suksesnya program pendidikan sembilan tahun ini. Selain itu pada tingkat pendidikan ini juga disiapkan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan keterampilan pada para siswa agar mereka mempunyai keterampilan dan siap terjun di dunia kerja. Upaya yang diacanakan pemerintah antara lain:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal.
- c. Penataan bidang keahlian terutama di bidang kejuruan.
- d. Penyediaan materi pendidikan media pengajaran dan teknologi pendidikan.

- e. Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas dengan cara memberikan perhatian.

4. Program Pendidikan Perguruan Tinggi

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemerataan bagi masyarakat yang ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, baik pada program diploma, sarjana, magister, spesialis, maupun doktor. Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintah pada program ini adalah:

- a. Penyiapan calon pendidik dan tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan standar.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Kurikulum yang mengacu pada standar nasional maupun internasional agar kita bisa bersaing dengan dunia luar.
- d. Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha.
- e. Penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi para mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi.

5. Program Pendidikan Non-Formal

Program pendidikan ini ditujukan kepada semua siswa dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu pendidikan ini merupakan pelengkap dari pendidikan formal yang diterima oleh para siswa. Pendidikan ini lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan

dan keterampilan fungsional. Adapun langkah konkrit yang direncanakan pemerintah adalah:

- a. Penguatan satuan lembaga pendidikan non-formal seperti kursus-kursus.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pengajar yang memadai pula.
- c. Disediaknya biaya operasional pendidikan serta subsidi bagi siswa yang kurang beruntung.
- d. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Program ini merupakan salah satu program yang populer di pemerintahan SBY-JK. Adapun tujuan dari program ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dalam semua sistem pendidikan baik itu formal maupun non-formal dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memberikan rasa nyaman pada para siswa serta adanya pengabdian pada masyarakat.
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik agar tingkat kemampuan yang dimiliki dalam menunjang proses pendidikan lebih baik lagi.

7. Program Pendidikan Kedinasan

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai negeri atau calon pegawai negeri. Hal yang dicanangkan untuk mencapai hal tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja departemen-departemen agar tercipta keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Menaikkan standar pendidikan kedinasan sesuai dengan standar profesi.

8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kebudayaan membaca serta bahasa dan sastra pada masyarakat dan pada siswa-siswa Indonesia. Adapun rencana yang akan dilakukan untuk menempuh hal itu adalah:

- a. Peningkatan dan perluasan pelayanan perpustakaan dan taman baca masyarakat.
- b. Pemantapan peraturan perundang-undangan tentang sistem perpustakaan nasional.
- c. Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, perpustakaan propinsi, perpustakaan Kabupaten/Kota, dan perpustakaan lainnya pada satuan perpustakaan pendidikan dan taman baca.
- d. Peningkatan fasilitas penulisan, penerbitan, dan penyebaran buku bacaan.

9. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Adapun rencana konkrit yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non-gelar.
- b. Pengembangan konsepsi pembaharuan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkan teknologi dan program yang inovatif.
- c. Pengembangan jaringan penelitian pada lintas sektor dan lintas wilayah.
- d. Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan antar jenjang pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

10. Program Manajemen Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan di daerah dengan mengembangkan pemerintahan yang baik (good governance). Adapun hal konkrit yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas intitusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan.

- b. Pengembangan sistem manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik, serta penerapan tata kelola satuan pendidikan yang baik, baik itu pendidikan swasta maupun nasional.
- c. Peningkatan efektivitas dan produktivitas pemanfaatan sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- d. Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan.

Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai Sekolah Menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa. Jumlah SD/MI yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2008 adalah sejumlah 2.035, SMP/MTs/SMP Terbuka sejumlah 529, dan SMA/MA/SMK sejumlah 381 sekolah negeri maupun swasta. Ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah memadai dengan rasio siswa per kelas untuk SD/MI: 22, SMP/MTs: 33, SMA/MA/SMK: 31. Sedangkan tingkat ketersediaan guru di Provinsi DIY juga cukup memadai dengan rasio siswa per guru untuk SD/MI: 13, SMP/MTs: 11, SMA/MA/SMK: 9. Untuk tahun 2010 pembinaan gurujenjang SD/MI sebanyak 3.900 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 24.093 guru. Jenjang SMP/MTs sebanyak 3.939 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 12.971 guru. Dan untuk SMA/MA sebanyak 4.826 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 15.067 guru.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTs, sejalan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2010, angka kelulusan SD/MI mencapai 96.47%, SMP/MTs mencapai 81.84% dan SMA/MA/SMK sebesar 88.98%. Sedangkan angka putus sekolah pada tahun yang sama sebesar 0.07% untuk SD/MI; 0.17% untuk SMP/MTs; dan 0.44% untuk SMA/MA/SMK. Sementara itu jumlah perguruan tinggi di Provinsi DIY baik negeri, swasta maupun kedinasan seluruhnya sebanyak 136 institusi dengan rincian 21 universitas, 5 institut, 41 sekolah tinggi, 8 politeknik dan 61 akademi yang diasuh oleh 9.736 dosen.

BAB V KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan, pertama bahwa selama sepuluh tahun sebelum krisis, ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi dua kali lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang berimbang, kebijakan ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada migas), dengan kebijakan neraca modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Dalam waktu yang sangat singkat banyak bermunculan bank-bank swasta di seluruh tanah air dan bertaburan korporasi-korporasi swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali dan penuh korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dibidang ekonomi, banyak sekali berbagai praktek-praktek illegal yang menyebabkan banyak kerugian Negara. Sedangkan kemelut krisis yang menghimpit masyarakat Indonesia telah membuat kemiskinan, kelaparan hingga kerusuhan di berbagai wilayah. Di sisi lain, penggalakan dwi fungsi ABRI yang menyebabkan jabatan sipil banyak dikuasai oleh kaum militer, perekrutan tenaga untuk jabatan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat (DPR/MPR) dengan gaya nepotistik, pembatasan seenaknya terhadap pers, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis prodemokrasi,

rekayasa atas beberapa kasus kriminal yang diduga kuat melibatkan anak pejabat dan aparat, pengabaian para pejabat terhadap putusan PTUN, intervensi dan pencengkeraman eksekutif terhadap badan legislatif dan yudikatif, pembiaran atas praktek mafia hukum.

Kedua, yaitu sampai krisis moneter mulai melanda perekonomian Indonesia pada bulan Juli 1997 pun, aksi mahasiswa yang mencoba menuntut perbaikan keadaan tidak begitu jelas terlihat. Reformasi total, itulah tuntutan para Mahasiswa Indonesia. Di Yogya, mahasiswa dari berbagai kampus bahkan menggelar rapat akbar, aksi diam menuntut perubahan, hingga mengadakan mimbar bebas guna mensukseskan gerakan reformasi. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi mahasiswa akan tuntutan reformasi tersebut menimbulkan ketegangan bahkan bentrokan dengan aparat keamanan hingga mengakibatkan korban jiwa. Adapun korban jiwa yang meninggal dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta adalah Mozes Gatotkaca seorang alumnus Akprind.

Di kota pelajar tersebut, pimpinan sekaligus gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun ikut dalam mendukung perjuangan para mahasiswa menuntut reformasi. Dengan diadakannya Pisowanan Ageng di Alun-alun kota Yogyakarta, Sri Sultan mengajak seluruh komponen rakyat Yogyakarta dan Indonesia untuk memperjuangkan reformasi di Indonesia. Dalam berbagai aksi yang digelar oleh para mahasiswa di Yogyakarta juga didukung oleh masyarakat, tokoh akademisi serta berbagai kalangan masyarakat. Berbagai peristiwa yang

terjadi dalam perjuangan reformasi tersebut akhirnya mencapai puncaknya. Yaitu dengan pengunduran Presiden Soeharto sebagai kepala Negara.

Ketiga adalah dari berbagai peran serta para mahasiswa dalam perjuangan reformasi tersebut tentunya memiliki dampak signifikan yang merubah segala bidang kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Dari dihapuskannya sistem pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis, hingga berbagai gerakan dalam pemberantasan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme. Segala perubahan-perubahan tersebut di tuangkan dalam berbagai undang-undang baru yang di tetapkan oleh pemerintah.

Tentunya hal tersebut membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ajang demokrasi yang bebas pun kian menambah dampak riil dalam perjuangan reformasi. Kebebasan pers dan hal asasi manusia dicanangkan oleh pemerintah. Di bidang pendidikan juga tidak luput dari tuntutan para mahasiswa. Pemerintah memberikan bantuan dana operasional hingga beasiswa dan pembangunan sekolah-sekolah di berbagai daerah di tanah air. Dalam percaturan politik di Indonesia pun menjadi lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Chanif. (1998). *Lahirnya Gerakan Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: DPP. Forum Komunikasi Anak Bangsa (Fokab).
- Adrian Nabung. (2000). *Dipersimpangan Jalan (Refleksi Transformasi Atas Kebudayaan Menuju Penegakan Hukum dan Rekonsiliasi), KKN dan Perjuangan Mahasiswa*. ISSN.
- Makmur Makka. A. (2008). *The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan*. Jakarta: Pustaka IIMaN.
- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arwan Tuti Artha. (2009). *Langkah Raja Jawa Menuju Istana: Laku Spiritual Sultan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Atapunang, AI.(2000). *KKN dan perjuangan Mahasiswa*. Maumere. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
- Daliman. (2006). *Pedoman Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY
- Darto Harnoko, *Demokrasi dalam perjalanan Sejarah (Studi Kasus Di DIY 1945-Awal Reformasi)*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,
- Donald K. Emmerson. (2001). *Indonesia beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farhan Effendy. (2000). *Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme*. Jakarta: Inside.
- Hasan Shadiliy. (1984). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Helius Sjamsudin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hiro Tugiman. (1999). *Budaya Jawa dan Mundurnya Presiden Soeharto*. Yogyakarta: Kanisius.
- IG Widja. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Yogyakarta: Kanisius.

- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2003). *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah* (Studi Kasus Di DIY 1945- Awal reformasi).
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lepi T. tarmidi. *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*.
- Louis Gottschalk. (1982) “ Understanding History “.a. b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Maxi Dae. (2000). *Mahasiswa dan Perjuangan Politik Yang Memihak, KKN dan Perjuangan Mahasiswa*. ISSN.
- Mohammad Hatta. (1996). *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: FASCO.
- Nugroho. (1983). *Indonesia Sekitar th. 2000*. Jakarta: Rajawali.
- Nusantara, A. Ariobimo. (1998). *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*. Jakarta: Grasindo.
- Octo Lampito. (1998). *Lengser Keprabon: Dokumen Reformasi*. Yogyakarta: Grafika Wangsa Bakti.
- Sindhunata. *Mendobrak Pintu Krisis*, Basis, Nomor 05-06, tahun ke 47, Mei-Juni 1998.
- Soeharto. (1998). *Tumbangnya Rezim Soeharto*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Tim. (2008). *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Tim Kompas. *Lahirnya Gerakan Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: DPP. Forum Komunikasi Anak Bangsa.
- Zamroni, A. & Andin, M. *Pahlawan Reformasi: Catatan Peristiwa 12 Mei 1998*. Jakarta: Pabelan Jayakarta.
- Sonny keraf. *Reformasi Politik dan Moral*. Pena Mahasiswa Maret-April.
- Stian Haklev. (2008). *Mencerdaskan Bangsa Suatu Pertanyaan Fenomena Taman Bacaan di Indonesia*. Advanced Seminar In international Development Studies IDSY01Y.

Depdagri tolak Usul DPRD DIY, *Harian Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, Rabu, 26 Agustus 1998.

Keterangan Suyitno, Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap Kulon Progo dalam; “Desa Yang Sarat Anak DO”, *Kedaulatan Rakyat*, Tanggal 25 Juli 1998

Soewarno. PJ, *Sengketa Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: Bernas, Selasa, 11 Agustus 1998, hlm. 1.

Sultan Hamengku Buwono X Kekuatan Populisnya, *Harian Bernas*, Yogyakarta, Sabtu, 3 Oktober 1998.

SW/Fia/Rsv, “Melongok Pasar yang Direnovasi, Jeritan Pedagang di Lorong Beringharjo”, *Kedaulatan Rakyat*, tgl. 29 Desember 1998.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rezim>. Diakses pada tanggal, 5 Maret 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Triseksi. diakses pada tanggal 12 Maret 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa.

<http://vgsiahaya.wordpress.com/2008/10/29/dilema-pisowanan-ageng>. diakses pada tanggal 11 Maret 2012.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/30/058407039/Masyarakat-Tionghoa-Dukung-Keistimewaan-Yogya>. diakses pada tanggal 24 Juli 2012.

id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli.

id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli.

vgsiahaya.wordpress.com/2008/.../dilema-pisowanan-ageng

LAMPIRAN



Foto : Wulan Agus Dharmadji

Alamat : Perum Griya Rejoindah. Jl. Cendrawasih 235
Japunan Magelang, Jawa Tengah

Alumnus : STIE Kerjasama

Prodi : Manajemen Perusahaan (D3) Tahun 91

Hasil wawancara responden Wulan Agus Dharmadji

1. Menurut anda, apakah yang menjadi sebab terjadinya peristiwa reformasi tahun 1998 di Indonesia?

Jawab : penyebab terjadinya reformasi adalah sebagai dampak dari krisis moneter, berbagai praktik KKN yang dilakukan pemerintahan Soeharto, serta berbagai penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan oleh rezim Orde baru.

2. Mengapa para mahasiswa terlibat dalam berbagai aksi dan demonstrasi menuntut reformasi?

Jawab : karena mahasiswa dipandang mampu untuk menggerakkan roda laju reformasi.

3. Bagaimana peranan mahasiswa dalam reformasi 1998 di Yogyakarta?

Jawab : mahasiswa di Yogyakarta sangat berperan dalam melakukan perubahan khususnya dalam menuntut reformasi. Awalnya para mahasiswa hanya menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatan kepala Negara. Namun kemudian aksi menyebar dan tuntutan semakin besar. Para mahasiswa menuntut agar dilakukan perubahan secepatnya di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Perjuangan para mahasiswa dilakukan melalui aksi demonstrasi dan berbagai protes-protes keras terhadap pemerintah.

4. Dalam aksi dan demonstrasi di Indonesia khususnya di Yogyakarta, apakah anda terlibat di dalamnya?

Jawab : iya. Tetapi hanya beberapa saja.

5. Dalam peristiwa Pisowanan Ageng yang digelar di Alun-alun Utara kota Yogyakarta, apakah anda mengikuti acara tersebut?

Jawab : iya

6. Apakah inti/isi dari peristiwa tersebut?

Jawab : inti dari peristiwa tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam mendukung secara penuh aksi reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan Beliau menghimbau agar reformasi yang sedang bergulir dilakukan secara damai dan aman.

7. Dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Tragedi Gejayan yang menewaskan 1 orang mahasiswa bernama Mozez Gatotkaca, apakah anda mengetahuinya?

Jawab : setahu saya, Mozez meninggal dalam sebuah aksi demonstrasi yang digelar di Barat Kampus Sanata Dharma pada tanggal 8 Mei 1998. Beliau meninggal dalam perjalanan ke RS Panti rapih.

8. Bagaimana rincian kejadian tersebut?

Jawab : setahu saya, aksi tersebut berawal dari demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Yogyakarta dan terpusat

di sebelah Barat Kampus Sanata Dharma. Berawal dari sanalah kemudian terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Beberapa jam kemudian telah ditemukan 1 orang tewas dalam perjalanan ke RS Panti Rapih. Beliau bernama Mozez Gatotkaca alumnus Akprind.

9. Bagaimana dampak dari perjuangan mahasiswa menuntut reformasi pada tahun 1998 khususnya di Yogyakarta dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pendidikan?

Jawab : dalam bidang politik mungkin terdapat kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Di bidang ekonomi menurut saya sama saja dengan sebelum reformasi namun mungkin terdapat beberapa perubahan dan perbaikan mengenai perdagangan, transparansi dalam bidang ekonomi, pemberantasan KKN dan lain sebagainya. Dalam bidang budaya dan sosial memiliki dampak yang sangat banyak diantaranya banyak bermunculan LSM dan forum-forum serta komite-komite lainnya. Kebebasan tidak lagi dibatasi. Namun demikian juga memiliki dampak negatif yaitu kekerasan yang mengatasnamakan kebebasan serta reformasi. Di bidang pendidikan terdapat BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang dicanangkan pemerintah kepada rakyat Indonesia.



Foto : Arini Susanti

Alamat : Perum Griya Rejoindah. Jl. Cendrawasih 235
Japunan Magelang, Jawa Tengah

Alumnus : STIE Kerjasama

Prodi : Manajemen Pembangunan (D3) Tahun 93

Hasil wawancara responden Wulan Agus Dharmadji

1. Menurut anda, apakah yang menjadi sebab terjadinya peristiwa reformasi tahun 1998 di Indonesia?

Jawab : krisis moneter menjadi pemicu utama aksi reformasi, kemudian terjadinya praktik KKN yang dilakukan pemerintahan Soeharto, serta berbagai penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Mengapa para mahasiswa terlibat dalam berbagai aksi dan demonstrasi menuntut reformasi?

Jawab : karena mahasiswa dipandang mampu untuk menggerakkan roda laju reformasi.

3. Bagaimana peranan mahasiswa dalam reformasi 1998 di Yogyakarta?

Jawab : Awalnya para mahasiswa hanya menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatan kepala Negara. Namun kemudian aksi menyebar dan tuntutan semakin besar sebagai akibat dari pihak yang ikut membongkang dalam aksi tersebut. Para mahasiswa menuntut agar dilakukan perubahan secepatnya di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Perjuangan para mahasiswa dilakukan melalui aksi demonstrasi dan berbagai protes-protes keras terhadap pemerintah.

4. Dalam aksi dan demonstrasi di Indonesia khususnya di Yogyakarta, apakah anda terlibat di dalamnya?

Jawab : iya. Tetapi hanya beberapa saja.

5. Dalam peristiwa Pisowanan Agung yang digelar di Alun-alun Utara kota Yogyakarta, apakah anda mengikuti acara tersebut?

Jawab : iya

6. Apakah inti/isi dari peristiwa tersebut?

Jawab : inti dari peristiwa tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam mendukung secara penuh aksi reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan Beliau menghimbau agar reformasi yang sedang bergulir dilakukan secara damai dan aman.

7. Dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Tragedi Gejayan yang menewaskan 1 orang mahasiswa bernama Mozez Gatotkaca, apakah anda mengetahuinya?

Jawab : setahu saya, Mozez meninggal dalam sebuah aksi demonstrasi yang digelar di Barat Kampus Sanata Dharma pada tanggal 8 Mei 1998. Beliau meninggal dalam perjalanan ke RS Panti rapih.

8. Bagaimana rincian kejadian tersebut?

Jawab : setahu saya, aksi tersebut berawal dari demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Yogyakarta dan terpusat di sebelah Barat Kampus Sanata Dharma. Berawal dari sanalah kemudian

terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Beberapa jam kemudian telah ditemukan 1 orang tewas dalam perjalanan ke RS Panti Rapih. Beliau bernama Mozez Gatotkaca alumnus Akprind.

9. Bagaimana dampak dari perjuangan mahasiswa menuntut reformasi pada tahun 1998 khususnya di Yogyakarta dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pendidikan?

Jawab : dalam bidang politik mungkin terdapat kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Di bidang ekonomi menurut saya sama saja dengan sebelum reformasi namun mungkin terdapat beberapa perubahan dan perbaikan mengenai perdagangan, transparansi dalam bidang ekonomi, pemberantasan KKN dan lain sebagainya. Dalam bidang budaya dan sosial memiliki dampak yang sangat banyak diantaranya banyak bermunculan LSM dan forum-forum serta komite-komite lainnya. Kebebasan tidak lagi dibatasi. Namun demikian juga memiliki dampak negatif yaitu kekerasan yang mengatasnamakan kebebasan serta reformasi. Di bidang pendidikan terdapat BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang dicanangkan pemerintah kepada rakyat Indonesia.



Gambar : Prof. Dr. H. Amien rais

Tersedia

pada

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.lazuardibirru.org/wp-content/uploads/2012/07/Amien-Rais-Blueprint-Masa-Depan-Pertanian-Indonesia-Tak-Jelas.jpg&imgrefurl=http://www.lazuardibirru.org/berita/news/amien-rais-blueprint-masa-depan-pertanian-indonesia-tak-jelas/&h=350&w=500&sz=101&tbnid=9YTZcTXVoay5jM:&tbnh=90&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3Damien%2Brais%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=amien+rais&usq=__HPS55-RvIzPRIgmnF9I0tBugQM=&docid=wxnpwD3orYK7sM&hl=id&sa=X&ei=boMeUJmLMo6qrAeE1IFw&ved=0CE8Q9QEwAw&dur=581. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012



Gambar : Aksi mahasiswa di Jalan Gejayan Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1998.

Tersedia pada
<http://www.google.co.id/imgres?q=peristiwa+gejayan&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=634&tbm=isch&tbnid=cGaacdK6hBK9vM:&imgrefurl=http://www.belantaraindonesia.org/2012/06/moses-gatokaca.html&docid=bF0XpJ2QF7vw0M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-J3HtKk3p3E4/T-Fv83BA5wI/AAAAAAAAAK7M/ilmHsDGwgSE/s400/tragedi%252BYogyakarta.jpg&w=400&h=300&ei=XoQeUKvmCcjXrQfT3oHYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=179&dur=9392&hovh=194&hovw=259&tx=58&ty=75&sig=102008805704898700558&page=1&tbnh=122&tbnw=160&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.



Gambar : Para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR RI Jakarta

Tersedia pada

http://www.google.co.id/imgres?q=peristiwa+kejayan&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=634&tbn=isch&tbnid=cut9z5nUbLL7QM:&imgrefurl=http://ourrandomthoughts.wordpress.com/2010/09/30/gerakan-mahasiswa-teori-dan-realita/&docid=j_ddl0WQwspUOM&imgurl=http://suaraanas.files.wordpress.com/2010/03/reformasi981.jpg%253Fw%253D350%2526h%253D217&w=350&h=217&ei=XoQeUKvmCcjXrQfT3oHYAg&zoom=1&iact=rc&dur=1278&sig=102008805704898700558&page=1&tbnh=104&tbnw=168&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:105&tx=71&ty=53 Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.



Gambar : Moses gatotkaca

Tersedia pada

<http://www.google.co.id/imgres?q=moses+gatotkaca&um=1&hl=id&biw=1024&bih=634&tbn=isch&tbnid=1jfZEnTCP8NFJM:&imgrefurl=http://www.belantaraIndonesia.org/2012/06/moses-gatotkaca.html&docid=bF0Xp>

<http://3.bp.blogspot.com/-4Wg9azMzowM/T-FwOZvnR5I/AAAAAAAAAK7c/OzioDMMazRw/s400/Moses%252BGatotkaca.jpeg&w=227&h=157&ei=wYUeUJrNMsrrAeTmYHAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=415&vpy=241&dur=390&hovh=125&hovw=181&tx=112&ty=46&sig=102008805704898700558&page=1&tbnh=125&tbnw=152&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.



Gambar : Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pisowanan Ageng Mei 1998 di Alun-alun Utara kota Yogyakarta.

Tersedia pada
http://www.google.co.id/imgres?q=pisowanan+ageng+1998&um=1&hl=id&biw=1024&bih=634&tbm=isch&tbnid=EXP3G5aTxM2dNM:&imgrefurl=http://sunudotcom.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&docid=h1T4uhFoAuxtaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_GdyH-l5anDY/TPSJJ2PVXtI/AAAAAAAAAeQ/GsUgJ9HR-r8/s320/sultan-mei-1998-300x140.jpg&w=300&h=140&ei=uoceUIfZBoOurAeh34GwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=110&vpy=59&dur=1787&hovh=112&hovw=240&tx=145&ty=41&sig=102008805704898700558&page=5&tbnh=84&tbnw=180&start=74&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:74,i:364 Diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.